



PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN




2025 - 2029

RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN PANGAN
KABUPATEN MAGETAN**

 (0351) 895180

 www.dlh.magetan.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan Tahun 2025–2029 dapat tersusun dan diselesaikan dengan baik.

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan strategis lima tahunan yang berfungsi sebagai pedoman dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada periode 2025–2029. Penyusunan dokumen ini dilaksanakan sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah, sekaligus tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2025–2029.

Dokumen Renstra ini disusun melalui proses yang sistematis, dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, isu-isu aktual di bidang lingkungan hidup dan pangan, serta memperhatikan masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, Renstra ini diharapkan mampu memberikan arah yang jelas, menjadi dasar pengambilan keputusan, serta mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah khususnya pada sektor lingkungan hidup dan pangan.

Kami menyadari bahwa tersusunnya dokumen ini tidak terlepas dari dukungan, kerjasama, dan kontribusi berbagai pihak, baik dari unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi, maupun masyarakat. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam proses penyusunan Renstra ini.

Semoga dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan Tahun 2025–2029 dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam mewujudkan tata kelola pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, memperkuat ketahanan pangan, serta mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Magetan.

Magetan, 19 - 12 - 2025

KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
KABUPATEN MAGETAN



SAIF MUCHLISSUN, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP-19721222 199303 1 005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR.....	5
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3. Maksud Dan Tujuan	5
1.4. Sistematika	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
PERANGKAT DAERAH.....	9
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	9
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.....	9
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	17
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	21
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan	37
2.1.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan	38
2.1.6. Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah.	38
2.1.7. Kerjasama Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah.....	38
2.2. Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	39
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	39
2.2.2. Isu Strategis	43
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	51
3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	51
3.2. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	55
3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	56
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	60
4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Urusan	60
4.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah mengacu pada Nomenklatur	85
4.3. Sub-Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah	113
4.4. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	116
4.5. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	121
BAB V PENUTUP	122



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Jumlah ASN berdasarkan Jenis Kelamin.....	17
Tabel 2. 2	Jumlah ASN berdasarkan Golongan/ Ruang.....	17
Tabel 2. 3	Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/ Eselon	17
Tabel 2. 4	Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	18
Tabel 2. 5	Jumlah Sumber Daya Manusia berdasarkan Status Kepegawaian ..	18
Tabel 2. 6	Jumlah ASN yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan	198
Tabel 2. 7	Jumlah Aset Tetap (Kategori dan Unit)	21
Tabel 2. 8	Jumlah Aset Tetap (Rupiah)	211
Tabel 2. 9	Hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD 5 tahun terakhir	22
Tabel 2. 10	Perumusan Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan ..	44
Tabel 3. 1	Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan 2025-2030.....	54
Tabel 3. 2	Penahapan Strategi Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan.....	55
Tabel 3. 3	Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	56
Tabel 4. 1	Perumusan Program, Kegiatan, Sub-Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	61
Tabel 4. 2	Rencana Program, Kegiatan, Sub-kegiatan dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan Tahun 2025-2030	86
Tabel 4. 3	Daftar Sub-kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	113
Tabel 4. 4	Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan ..	116
Tabel 4. 5	Definisi Operasional/ Rumus IKU Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan.....	116
Tabel 4. 6	Indikator Kinerja Kunci Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan...	121



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Indeks Kualitas Udara.....	24
Gambar 2. 2 Indeks Kualitas Air.....	24
Gambar 2. 3 Persentase Peningkatan Tutupan Lahan/ Vegetasi.....	26
Gambar 2. 4 Persentase Pemenuhan Baku Mutu Air	27
Gambar 2. 5 Persentase Pemenuhan Baku Mutu Udara	27
Gambar 2. 6 Persentase Pengelolaan Sampah di Kec. Kota Kabupaten Magetan.....	28
Gambar 2. 7 Persentase Kelompok/ Lembaga Yang Peduli Terhadap Kelestarian Lingkungan	29
Gambar 2. 8 Angka Kecukupan Energi (AKE) Tingkat Ketersediaan.....	29
Gambar 2. 9 Angka Kecukupan Protein (AKP) Tingkat Ketersediaan	30
Gambar 2. 10 Skor Pola Pangan Harapan.....	31

**BAB
1****PENDAHULUAN****1.1. LATAR BELAKANG**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah amanat regulasi yang disusun secara sistematis dan logis sebagai turunan dari sasaran kinerja pemerintah daerah yang tertuang di dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dasar hukum penyusunan Renstra antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan petunjuk pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Renstra dilakukan secara sinergis dan sinkron dengan RPJMD yang menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), politis, serta atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Pedoman Teknis diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Dengan telah dilaksanakannya Pilkada serentak di seluruh Indonesia serta pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Pemerintah Daerah secara serentak diwajibkan menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah. Dokumen tersebut adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah. RPJMD memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Penyeragaman periodisasi RPJMD di seluruh daerah dengan RPJMD merupakan langkah strategis untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah serta bertujuan untuk memudahkan pencapaian target pembangunan nasional maupun daerah. Sebagai tindak lanjut, setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang berpedoman pada RPJMD. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat program, kegiatan, dan



sub-kegiatan; tujuan beserta indikator tujuan; sasaran beserta indikator sasaran; strategi dan arah kebijakan; serta pagu indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tujuan mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang telah dituangkan dalam RPJMD.

Indikator dan target kinerja Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja pemerintah daerah yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Sedangkan, upaya mencapai sasaran perangkat daerah di dalam Renstra, dilakukan melalui serangkaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penyesuaian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dalam perkembangannya terdapat perubahan nomenklatur berdasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tahapan penyusunan Renstra dilakukan meliputi: 1) Persiapan Penyusunan Renstra; 2) Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra; 3) Penyusunan rancangan akhir Perubahan Renstra dan 4) Penetapan Perubahan Renstra. Pada proses penyusunan rancangan Perubahan Renstra mencakup antara lain: pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, review Renstra K/L (Kementerian/ Lembaga) dan Provinsi, penelaahan dan analisis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), perumusan isu strategis, perumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun. Seluruh dokumen yang merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan adalah merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu sehingga seluruh tahapan-tahapan dan dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Demikian halnya dengan dokumen Renstra sebagai salah satu komponen dokumen perencanaan pembangunan daerah. Keterkaitan dimaksud meliputi keterkaitan tujuan dan sasaran, program, kegiatan termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya. Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan pada RPJMD. Sehingga tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program dalam rencana indikatif pada RPJMD. Maka, prinsip yang mendasari penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan Tahun 2025 – 2029 ini adalah sebagai rencana operasional untuk pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Magetan di bidang lingkungan hidup dan pangan yang selaras dengan isu dan permasalahan Nasional.



Renstra perangkat daerah yang sudah disusun dan disahkan, selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek atau tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja merupakan dokumen acuan operasional Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun. Pada pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah lingkup Kabupaten/Kota harus dipastikan bahwa indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju pada penyusunan Renja Perangkat Daerah telah berpedoman pada indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan serta pendanaan indikatif pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;



9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Strategis Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5236);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 12);
14. Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
23. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025 2029;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 seri E);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2025-2029;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005–2045, (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan tahun 2024 nomor 03);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2044;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025 – 2029;
30. Peraturan Bupati Magetan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan Tahun 2025 - 2029 adalah memberikan pedoman melalui tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan penjabarannya dalam program kegiatan bidang lingkungan hidup dan pangan untuk periode tahun 2025 - 2029.

Tujuan disusunnya Renstra adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan sasaran, program dan kegiatan beserta target kinerja untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) periode tahun 2025 - 2029;
- b. Menyediakan dokumen evaluasi kinerja pelayanan yang telah dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan dalam periode tahun 2019 - 2023 dan periode transisi tahun 2024-2026;
- c. Merumuskan rencana kerja dan kinerja pelayanan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan dalam periode tahun 2025 - 2029;
- d. Menetapkan strategi dan arah kebijakan pencapaian sasaran yang dilakukan melalui usulan program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode Renstra tahun 2025 - 2029; dan



- e. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran dan lokus program kegiatan dalam periode tahun 2025 - 2029.

1.4. SISTEMATIKA

Penyusunan dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan tahun 2025 - 2029 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- | | | |
|-----|------------------------|--|
| 1.1 | Latar Belakang | Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi dan nilai strategis Renstra Perangkat Daerah |
| 1.2 | Dasar Hukum Penyusunan | Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum |
| 1.3 | Maksud dan Tujuan | Berisi tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 |
| 1.4 | Sistematika Penulisan | Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 |

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

- | | | |
|-------|--|---|
| 2.1 | Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah | |
| 2.1.1 | Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah | Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala Perangkat Daerah |
| 2.1.2 | Sumber Daya Perangkat Daerah | Penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya (mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional) |
| 2.1.3 | Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | Menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan |



- | | | | |
|-------|--|--|--|
| 2.1.4 | Kelompok Pelayanan Daerah | Sasaran Perangkat Daerah | sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya (SPM, SDG's, indikator yang telah di ratifikasi Pemerintah, dan indikator pelayanan perangkat daerah lainnya) Berisi kelompok sasaran yang mendapatkan pelayanan Perangkat Daerah |
| 2.1.5 | Mitra | Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan | Berisi uraian mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan |
| 2.1.6 | Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah | | Berisi uraian dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja |
| 2.1.7 | Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggungjawab Perangkat Daerah | | Berisi uraian kerjasama daerah yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah |
| 2.2 | Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah | | |
| 2.2.1 | Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah | | Permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. |
| 2.2.2 | Isu-isu Strategis Perangkat Daerah | | Isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah Tahun rencana |

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- | | | |
|-----|--|---|
| 3.1 | Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025-2029 | Menunjukkan keterkaitan dan konsistensi antar tujuan RPIMD periode berkenaan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah |
| 3.2 | Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 | Rumusan pernyataan strategi Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang |
| 3.3 | Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 | Rumusan pernyataan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang |

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana program, kegiatan, sub-kegiatan, kinerja, indikator kinerja, dan pagu indikatif.

- | | | |
|-----|---|---|
| 4.1 | Program, Kegiatan dan Sub-kegiatan Perangkat Daerah hasil <i>Cascading</i> dari Tujuan, Sasaran, <i>Outcome</i> dan <i>Output</i> | Berisi program, kegiatan dan sub-kegiatan Perangkat Daerah hasil <i>Cascading</i> dari Tujuan, Sasaran, <i>Outcome</i> dan <i>Output</i> dari pohon kinerja |
| 4.2 | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah | Rencana program, kegiatan, sub-kegiatan, kinerja, indikator kinerja, |



- | | | |
|--|--|--|
| <p>4.3 Sub-kegiatan dalam rangka Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah</p> | <p>mengacu pada Nomenklatur dan pagu indikatif</p> | <p>Uraian sub-kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah</p> |
| <p>4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah</p> | <p>dan pagu indikatif</p> | <p>Berisi target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui IKU Perangkat Daerah.</p> |
| <p>4.5 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)</p> | <p>Kinerja</p> | <p>Berisi target kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah</p> |

BAB V : PENUTUP

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah

**BAB
2****GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH****2.1. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH****2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.**

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan. Urusan pemerintahan bidang Pangan yang sebelumnya menjadi bagian struktur organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan, pada tahun 2024 urusan Ketahanan Pangan digabungkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan, sehingga nomenklatur Perangkat Daerah berubah menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan didukung oleh Sumber Daya Manusia dan aset/modal. Adapun Sumber Daya Manusia pada tahun 2024 terdiri dari 66 orang PNS, 1 orang P3K dan 230 Non ASN.

2.1.1.1. Tugas

Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 10, Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

2.1.1.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan pangan
- b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup dan pangan
- c. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup dan pangan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya



2.1.1.3. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan terdiri atas:

A. Kepala Dinas Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan;

B. Sekretariat Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, membina dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan, keprotokolan, rumah tangga, keamanan, kebersihan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
- pengoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara yang menjadi tanggungjawab Dinas;
- pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan;
- pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, kesejahteraan pegawai, dan organisasi; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri atas 2 (dua) sub bagian yaitu:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- melaksanakan administrasi persuratan;
- melaksanakan pengelolaan kearsipan Dinas;
- melaksanakan urusan keprotokolan, rumah tangga, keamanan, kebersihan, dan penyelenggaraan rapat;
- melaksanakan kegiatan penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/barang milik daerah/negara;
- melaksanakan pengadaan barang dan jasa serta pemeliharaan barang;
- melaksanakan pelayanan administrasi dan pengadaan dan pendistribusian peralatan/perlengkapan kantor;
- melaksanakan urusan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;
- melaksanakan urusan kelembagaan dan analisis jabatan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

2. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:

- Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran;
- mengumpulkan dan mengolah bahan untuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA);
- menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tak langsung;
- melaksanakan tata usaha keuangan, perjalanan dinas dan gaji pegawai;
- memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan;



- o menghimpun peraturan mengenai administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran;
- o menyusun laporan keuangan;
- o melaksanakan evaluasi dan monitoring anggaran; dan
- o melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

C. Bidang Tata Lingkungan, Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Tata Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan inventarisasi lingkungan hidup;
2. perumusan kebijakan penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
3. penyusunan dokumen RPPLH;
4. pengoordinasian dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dan RPJMD, RPJPD dan RTRW berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
5. penyusunan status lingkungan hidup;
6. penyusunan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi KLHS;
7. pelaksanaan perlindungan, pengawetan, pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam;
8. perencanaan dan penetapan kebijakan konservasi, pemantauan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
9. pemantauan, pengembangan sistem informasi dan pengelola database keanekaragaman hayati;
10. penyusunan profil dan pengembangan keanekaragaman hayati;
11. pengelolaan taman keanekaragaman hayati di luar Kawasan hutan;
12. pelaksanaan pembinaan hasil penataan lingkungan hidup kepada pemangku kepentingan;
13. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Tata Lingkungan; dan
14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

D. Bidang Pengelolaan sampah dan Limbah B3, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, mempunyai fungsi:

1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengurangan sampah, penanganan sampah dan limbah B3;
2. perumusan kebijakan pengangkutan, pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah;
3. penyusunan informasi pengelolaan sampah;
4. perumusan kebijakan dan penetapan target pengurangan dan penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;



5. pembinaan pembatasan timbunan sampah, pemanfaatan kembali sampah, pendauran ulang sampah kepada produsen/produksi dan masyarakat;
6. penyediaan fasilitas pemanfaatan kembali sampah, pendauran ulang sampah kepada produsen/produksi dan masyarakat;
7. pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu di urai oleh proses alam;
8. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan sampah dan limbah B3;
9. Pemberian insentif dan disinsentif pengelolaan sampah oleh pihak lain;
10. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
11. penetapan lokasi dan pengawasan terhadap TPS, TPS3R, Transfer Depo, Rumah Kompos, TPST3R dan TPA;
12. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
13. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
14. pelaksanaan kerjasama dengan daerah lain/atau pihak ketiga dalam menyelenggarakan pengelola sampah dan limbah B3;
15. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
16. penyusunan kebijakan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang di selenggarakan oleh pihak lain;
17. penyusunan kebijakan pengembangan dan pelaksanaan penghargaan terkait lingkungan bersih, hijau dan sehat;
18. perumusan penyusunan kebijakan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
19. perumusan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3;
20. pelaksanaan kebijakan pengumpulan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
21. pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
22. pelaksanaan pemulihan pencemaran limbah B3;
23. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3; dan
24. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala dinas.

E. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, mempunyai fungsi:

1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemantauan lingkungan (kualitas air, udara, tanah), sumber pencemar, penanggulangan, pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan;



2. penentuan baku mutu lingkungan dan sumber pencemar;
3. penyiapan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
4. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
5. pelaksanaan pembinaan dan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi pemantauan lingkungan dan sumber pencemar;
6. perumusan dan pelaksanaan kebijakan kajian dampak lingkungan;
7. pengkoordinasian pelaksanaan instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
8. pelaksanaan penerapan instrument ekonomi lingkungan hidup;
9. penyiapan penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
10. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
11. penyusunan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK);
12. penerbitan persetujuan teknis dan SLO bagi kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah dan pembuangan emisi;
13. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan;
14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

F. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup;
2. perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengaduan dan penegakan hukum lingkungan serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
3. penyiapan pemetaan kebutuhan dan kesesuaian persetujuan lingkungan pada usaha dan/atau kegiatan;
4. pembinaan, pengawasan dan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup;
5. pelaksanaan penanganan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
6. pengembangan informasi penerapan pengaduan masyarakat;
7. pembinaan tata laksana AMDAL dan penilaian dokumen lingkungan serta persetujuan lingkungan;
8. pemberian rekomendasi persetujuan lingkungan;
9. penyusunan kebijakan, pengembangan, pelaksanaan penghargaan bidang lingkungan hidup;
10. perumusan dan pelaksanaan kebijakan penghargaan lingkungan hidup;



11. penyusunan dan penetapan pengakuan keberdaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH;
12. peningkatan kapasitas dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait dengan PPLH;
15. penyusunan profil kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
16. pelaksanaan pembinaan lingkungan hidup untuk masyarakat, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga kemasyarakatan;
17. perumusan, pengoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
18. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
19. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

G. Bidang Pangan, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta pengolahan dan pemasaran hasil pangan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pangan, mempunyai fungsi:

1. penyiapan pelaksanaan koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
2. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
3. penyiapan pelaksanaan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
5. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan supervisi ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
6. pelaksanaan pengembangan promosi pemasaran usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal;
7. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;



8. penyiapan dan pelaksanaan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam stabilisasi pasokan dan harga pangan;
9. penyiapan bahan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat;
10. pelaksanaan pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan;
11. pelaksanaan pengembangan dan pemantapan penganekaragaman dan pola konsumsi pangan, serta pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang beredar;
12. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atau pelaksanaan urusan di bidang pangan;
13. pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, pelepasan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah;
14. pengembangan sistem informasi pangan dan pengembangan jaringan pasar;
15. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Pangan; dan
16. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.



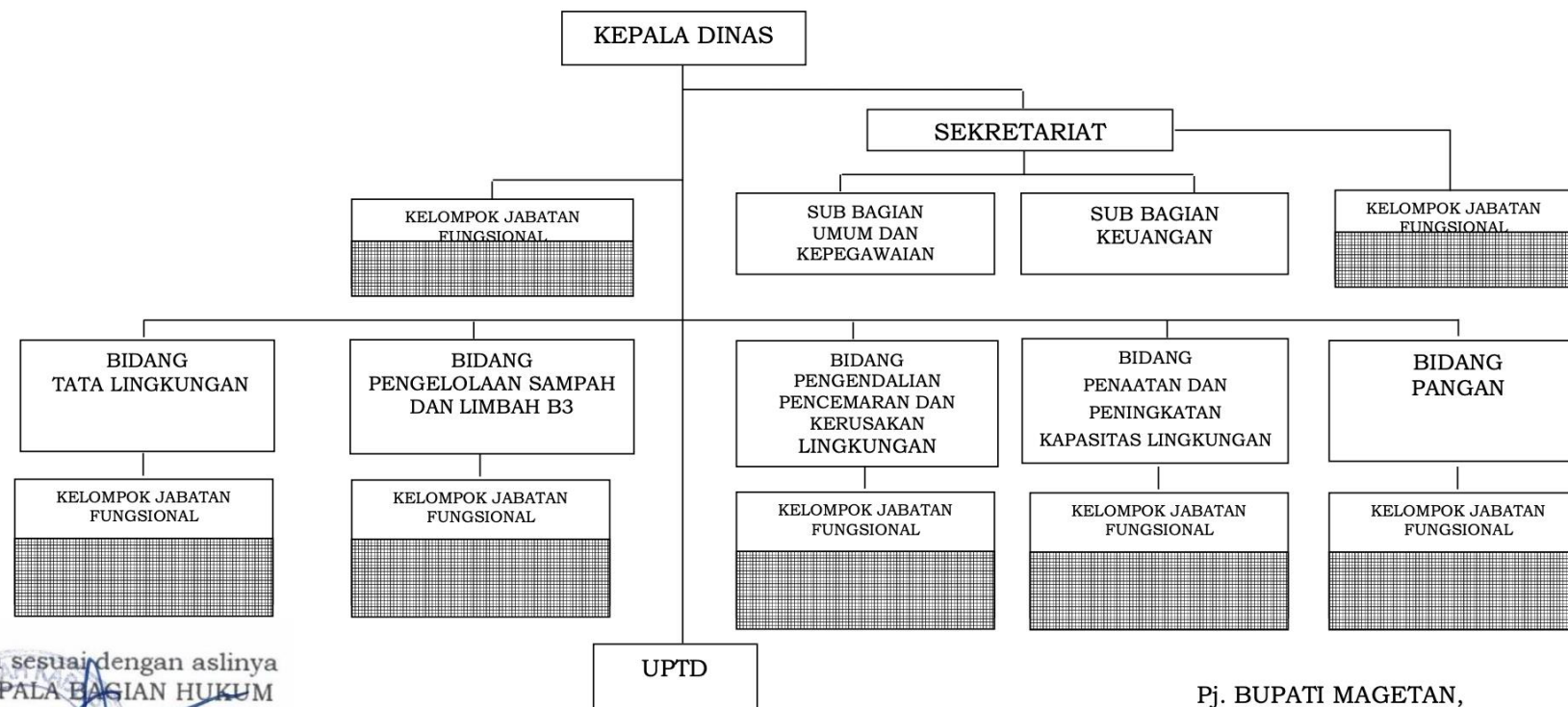
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN KAB. MAGETAN

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 10 TAHUN 2024

TANGGAL : 5 Februari 2024

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN



Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

Pj. BUPATI MAGETAN,

TTD
HERGUNADI



2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1. Sumber Daya Perangkat Daerah

Kinerja suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh dukungan sumber daya yang dimilikinya. Pelaksanaan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan didukung dengan keberadaan SDM dan sarana serta prasarana yang memadai.

A. Sumber Daya Manusia

Data kepegawaian pada periode waktu sebelumnya dengan nomenklatur Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan per 31 Desember 2024 didukung sumber daya manusia dengan jumlah dan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah ASN berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2. 1

Jumlah ASN berdasarkan Jenis Kelamin

No	Golongan/Ruang	Jumlah (orang)
1	Laki-laki	50
2	Perempuan	17
Jumlah		67

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat DLHP Kab. Magetan Tahun 2024

2. Jumlah ASN Berdasarkan Golongan/ Ruang

Tabel 2. 2

Jumlah ASN berdasarkan Golongan/ Ruang

No.	Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Strata 3	-
2.	Strata 2	6 Orang
3.	Strata 1/Sederajad	17 Orang
4.	Diploma	1 Orang
5.	SMA/Sederajad	39 Orang
6.	SMP/Sederajad	3 Orang
7.	SD/Sederajad	1 Orang
Jumlah		67 Orang

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat DLHP Kabupaten Magetan tahun 2024.

3. Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan/Eselon

Tabel 2. 3

Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/ Eselon

No.	Pangkat/Golongan Ruang	Jumlah (orang)
1.	Pembina Utama/IV-d	-
2.	Pembina Utama Muda/IV-c	1 Orang
3.	Pembina Tk.I/IV-b	-
4.	Pembina/IV-a	5 Orang
5.	Penata Tk.I/III-d	9 Orang



No.	Pangkat/Golongan Ruang	Jumlah (orang)
6.	Penata/III-c	3 Orang
7.	Penata Muda Tk.I/III-b	5 Orang
8.	Penata Muda/III-a	10 Orang
9.	Pengatur Juru/II-d	15 Orang
10.	Pengatur /II-c	14 Orang
11.	Pengatur Muda/II-b	1 Orang
12.	Pengatur/IIa	3 Orang
	Jumlah	67 orang

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat DLHP
Kab Magetan tahun 2024

4. Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2. 4

Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Strata 3	-
2.	Strata 2	6 Orang
3.	Strata 1/Sederajad	17 Orang
4.	Diploma	1 Orang
5.	SMA/Sederajad	39 Orang
6.	SMP/Sederajad	3 Orang
7.	SD/Sederajad	1 Orang
	Jumlah	67 Orang

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat DLHP
Kabupaten Magetan tahun 2024

5. Jumlah Sumber Daya Manusia Berdasarkan Status Kepegawaian

Tabel 2. 5

Jumlah Sumber Daya Manusia berdasarkan Status Kepegawaian

No.	Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	PNS	66 Orang
2.	P3K	1 Orang
3.	Non ASN	230 Orang
	Jumlah	297 Orang

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat
DLHP Kabupaten Magetan tahun 2024

6. Jumlah Jumlah ASN yang telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

Tabel 2. 6

Jumlah ASN yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

No.	Diklat Kepemimpinan	Jumlah (orang)
1.	Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II	-
2.	Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)	3 Orang
3.	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)	6 Orang
	Jumlah	9 Orang

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat
DLHP Kabupaten Magetan tahun 2024



B. Aset dan Modal

Sebagai penunjang operasional kelembagaan, Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan memiliki sarana dan prasarana sebagai upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun sarana dan prasarana tersebut berupa tanah, bangunan gedung, alat transportasi, peralatan dan perlengkapan kantor. Adapun inventaris kantor sampai dengan bulan Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 7
Jumlah Aset Tetap (Kategori dan Unit)

No	Nama Aset	Satuan	Jumlah
1	Buldozer	Unit	2
2	Wheel Excavator	Unit	3
3	Dump Truck	Unit	2
4	Mesin Pencacah Sampah	Unit	2
5	Truck Loader + Armroll	Unit	1
6	Alat Penarik Container Sampah	Unit	1
7	Sumersible Pump	Unit	1
8	Pompa Dump Truck dan Container	Unit	1
9	Mobil Dinas Kantor Roda 4	Unit	5
10	Pick Up	Unit	8
11	Truck+Attachment	Unit	11
12	Sepeda Motor	Unit	20
13	Sepeda Motor Roda 3	Unit	19
14	Sepeda Motor Roda 3 (tangki Air)	Unit	1
15	Gerobak Dorong	Unit	1
16	Mesin Gergaji	Unit	3
17	Alat Biopori	Unit	17
18	Timbangan Duduk (kapasitas 200kg)	Unit	1
19	Container Sampah	Unit	40
20	Rak Penyimpanan	Unit	1
21	Alat Pengambil Sample Sampah	Unit	1
22	Alat Pencacah Hijauan	Unit	13
23	Lemari Besi / Metal	Unit	1
24	Rak Besi / Metal	Unit	5
25	Filling Besi / Metal	Unit	9
26	Brankas	Unit	1
27	Papan Pengumuman	Unit	25
28	Papan Tulis	Unit	2
30	Jaringan CCTV	Unit	3
31	LCD Proyektor	Unit	4
32	Lemari Kayu	Unit	9
33	Rak Kayu	Unit	3
34	Meja Kayu / Rotan	Unit	1
35	Zice	Unit	1
36	Meja Rapat	Unit	2
37	Kursi Rapat	Unit	50



No	Nama Aset	Satuan	Jumlah
38	Meja Resepsionis	Unit	1
39	Kursi Tamu	Unit	2
40	Bangku Tunggu	Unit	1
41	Shofa	Unit	2
42	Mesin Potong Rumput	Unit	20
43	Tempat Sampah	Unit	5
44	Lemari Es	Unit	2
45	AC Unit	Unit	11
46	Wireless	Unit	2
47	Tangga Alumunium	Unit	2
48	Camera Film	Unit	1
49	HandyCam	Unit	1
50	Alat Pemadam / Portable	Unit	4
51	PC unit	Unit	10
52	Laptop	Unit	12
53	Printer	Unit	18
54	Finger Print	Unit	1
55	Meja Kerja	Unit	45
56	Kursi Kerja Pegawai	Unit	57
57	Lemari Arsip	Unit	5
58	Audio Amplifier	Unit	1
59	Camera Digital	Unit	6
60	Layar Proyektor	Uni	1
61	Jembatan Timbang	Unit	1
62	Faximail	Unit	1
63	Spectrophotometer	Unit	1
64	Water Batch	Unit	1
65	Ventilator	Unit	1
66	Alat Uji Kimia Logam	Unit	1
67	Mesin Potong Jerami	Unit	1
68	Microscope Binokuler	Unit	1
69	Peralatan Pencampur Kompos	Unit	1
70	Papan Panel	Unit	5
71	Pocet Altimeter	Unit	1
72	Container	Unit	4
73	Standart Gas Generator	Unit	2
74	Miling Machine	Unit	1
75	Elemental Analysis	Unit	1
76	Timbangan	Unit	1

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat DLHP Kab Magetan
th. 2024

Tabel 2. 8
Jumlah Aset Tetap (Rupiah)

No.	Aset Tetap	Per 31 Desember Tahun 2023 (Rp)	Mutasi Tahun		Per 31 Desember Tahun 2024 (Rp)
			Bertambah	Berkurang	
1.	Tanah	22.727.244.939,00	-	-	22.724.244.939,00
2.	Peralatan dan Mesin	26.585.799.454,00	477.937.395,00	539.427.500,00	26.524.309.349,00
3.	Gedung dan Bangunan	26.749.587.489,00	839.145.423,00	1.763.167.249,00	25.717.821.556,00
4.	Jalan,Irigasi dan Jembatan	8.393.147.660,00			8.392.920.356,00
5.	Aset Tetap Lainnya	66.574.000,00			66.574.000,00
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan.	513.017.026,00			513.017.026,00
Jumlah		85.035.370.568,00	1.317.082.818,00	2.302.594.749,00	84.049.858.637,00

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat DLHP Kab Magetan th. 2024

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan pada periode waktu sebelumnya adalah merupakan kinerja pelayanan dengan nomenklatur Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan. Gambaran kinerja pelayanan dapat diberikan melalui gambaran data pencapaian kinerja pelayanan tahun 2020 – 2024 sebagaimana terinci pada tabel hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kab. Magetan 5 tahun terakhir di bawah ini:

Tabel 2. 9
Hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD 5 tahun terakhir

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Indeks Kualitas Udara (IKU)			IKU	87,04	88,42	88,52	88,62	89,92	85,10	85,28	89,68	89,90	93,82	94,46	97,77	96,45	101,31	104,34
2	Indeks Kualitas Air (IKA)			IKU	52	53,39	53,49	53,59	53,69	53,13	55,28	52,78	56,03	56,51	104,18	106,31	98,86	104,75	105,25
3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)			IKU	67,625	33,56	34,16	34,77	37,22	67,61	67,61	34,93	33,72	36,72	99,99	99,98	104,08	98,71	98,66
4	Persentase Peningkatan Tutupan Lahan/Vegetasi				70	75	80	85	62,5	72,22	78,06	83,46	86,59	86,59	103,17	104,08	104,33	101,87	103,2%
5	Persentase Pemenuhan Baku Mutu Air				75	80	85	90	100	75	79,75	85	84,21	100	100	99,69	100	93,57	100
6	Persentase Pemenuhan Baku Mutu Udara				75	80	85	90	100	75,00	80	85	90	100	100	100	100	100	100
7	Persentase pengelolaan sampah di Kec. Kota Kabupaten Magetan				97	98	99	99	99	97,58	98,06	99,33	99,91	99,93	100,60	100,06	100,33	100,92	100,94
8	Persentase Kelompok/ Lembaga yang peduli terhadap kelestarian lingkungan				-	-	50	51	53	-	-	51,52	52,38	53,84	-	-	103,04	102,71	101,58
9	Angka Kecukupan Energi (AKE) Tingkat				-	-	2400	2400	6307	5.702	6.072,45	6067,44	6867	6310	-	-	252,81	286,55	100,05

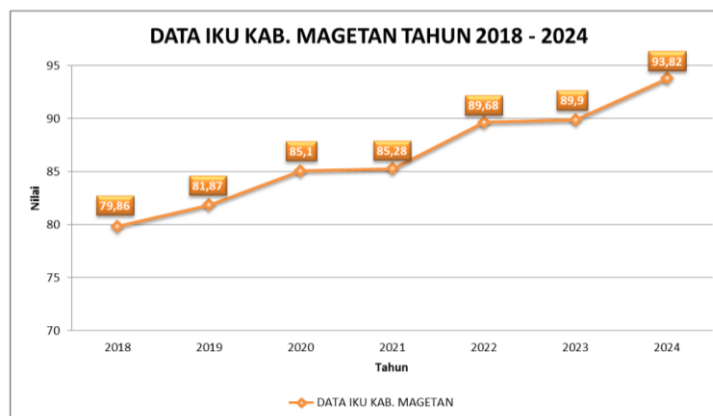
No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Ketersediaan																		
10	Angka Kecukupan Protein (AKP) Tingkat Ketersediaan				-	-	63	134,52	213,52	132,86	137,72	134,52	157,31	286,25	-	-	151,04	151,04	100,05
11	Skor Pola Pangan Harapan			IKU	-	-	89,7	89,9	93,4	84,9	88,8	92,60	93,40	93,60	-	-	103,23	104	100,21



Berdasarkan tabel 2.9. untuk masing – masing indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Indeks Kualitas Udara (IKU)

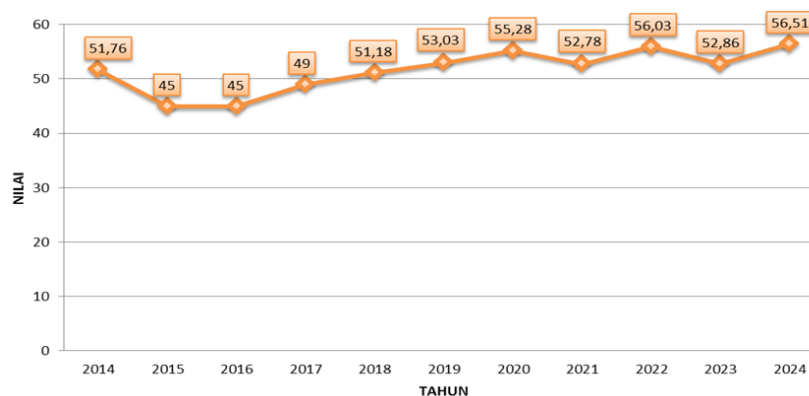
Gambar 2. 1
Indeks Kualitas Udara



Indeks Kualitas Udara pada Tahun 2018 hingga 2024 mengalami kenaikan. Mulai tahun 2020, Indeks kualitas udara mengalami kenaikan sebesar rata-rata 2,98 poin selama 5 tahun. Nilai Capaian IKU tahun 2020 sebesar 85,10 dan capaian tahun 2024 menjadi sebesar 93,82 tergolong pada kategori baik. Capaian tersebut diatas capaian IKU Provinsi Jawa Timur tahun 2024 yaitu 88,09 serta diatas capaian IKU Nasional tahun 2024 yaitu 90,18. Hasil dari pemantauan secara kualitas udara ambien di Kabupaten Magetan sudah memenuhi baku mutu, namun tetap dilakukan upaya peningkatan antara lain dengan pengendalian sumber pencemar, edukasi serta pengawasan terhadap ketaatan lingkungan dalam mempertahankan kualitas udara.

b. Indeks Kualitas Air (IKA)

Gambar 2. 2
Indeks Kualitas Air



Indeks Kualitas Air di Kabupaten Magetan pada Tahun 2014 ke Tahun 2015 dan Tahun 2016 mengalami penurunan dari 51,76 menjadi 45. Hal ini disebabkan semakin banyak usaha dan/ atau kegiatan yang



membuang limbahnya ke sungai dan kurangnya upaya pengelolaan dan pemantauan air sungai. Pada Tahun 2016 ke Tahun 2017 mengalami peningkatan dari 45 ke 49. Pada Tahun 2017 ke Tahun 2018 mengalami peningkatan dari 49 ke 51,18 dan pada Tahun 2019 meningkat menjadi 53,13. Pada Tahun 2020 Indeks Kualitas Air di Kabupaten Magetan mengalami peningkatan menjadi 55,28, pada Tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 52,78, pada tahun 2022 nilai IKA mengalami peningkatan menjadi 56,03 kemudian pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 52,86. Hal ini mengindikasikan perlu adanya upaya pengelolaan kualitas air di Kabupaten Magetan yang berkelanjutan untuk meningkatkan indeks kualitas air tersebut. Peningkatan konsentrasi parameter kualitas air ini sebagian besar disebabkan oleh adanya peningkatan air limbah domestik, pertanian/peternakan dan industri.

Pada tahun 2024 IKA Kabupaten Magetan mengalami peningkatan menjadi 56,51 dan telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 53,69, hal ini mengindikasikan berhasilnya upaya pengelolaan kualitas air di Kabupaten Magetan. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan indeks kualitas air antara lain dengan melakukan sosialisasi pengendalian pencemaran air, program aksi kali bersih (Si-Kasih), pengawasan dan mendisiplinkan para pelaku usaha dalam mengolah limbah yang dihasilkan.

c. Indeks Kualitas Lahan (IKL)

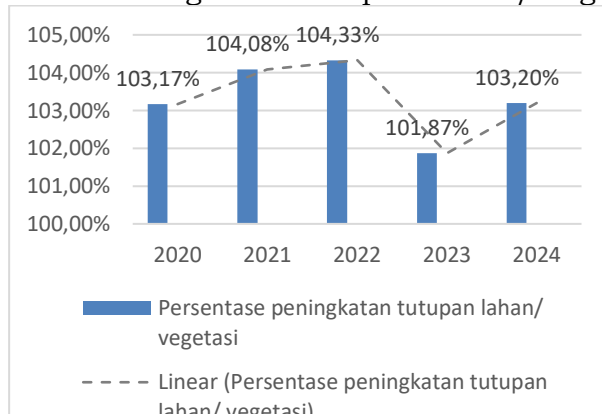
Indeks Kualitas Lahan (IKL) Terdapat perubahan metode perhitungan pada Indeks Kualitas Lahan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada tahun 2022 dan 2024 tutupan lahan yang dihitung meliputi kawasan hutan dan diluar kawasan hutan. Mulai tahun 2024 yang masuk kedalam perhitungan tutupan lahan hanya wilayah diluar Kawasan hutan, sedangkan wilayah hutan masuk kedalam perhitungan tutupan lahan Nasional. Tahun 2022 terdapat perubahan metode verifikasi oleh KLHK terhadap tutupan lahan. Dapat dilihat pada tabel di atas capaian Indeks Kualitas Lahan tahun 2019 dan 2020 sebesar 67,61 dengan perbandingan luas hutan dengan luas wilayah 49,12%. Angka ini masih diatas syarat minimal yaitu 30% karena wilayah hutan masuk kedalam perhitungan. Sedangkan di tahun 2021 capaian menjadi 34,93 karena perhitungan tutupan lahan hanya dari wilayah di luar Kawasan hutan. Pada tahun 2022 turun menjadi 33,72 karena terdapat perubahan metode verifikasi dari KLHK pada tutupan lahan berdasarkan citra satelit dimana kualitas lahan dihitung dari vegetasi yang berfungsi ekologi. Sebelumnya seluruh RTH terverifikasi oleh Pusat, namun di tahun 2022 RTH tanpa vegetasi pepohonan tidak dapat dimasukkan dalam penghitungan IKL. Instalasi Militer yang sebelumnya masuk ke dalam perhitungan IKL di tahun 2022 tidak dapat dimasukkan dalam penghitungan. Beberapa hal yang mempengaruhi indeks kualitas lahan antara lain aktivitas industri dan pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai dengan tata ruang, menyebabkan berkurangnya kemampuan lahan untuk melindungi air dan tanah, peningkatan permukiman dapat menimbulkan tekanan terhadap ketersediaan lahan sesuai dengan



fungsinya dan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan fungsi dan kaidah konservasi.

d. Persentase peningkatan tutupan lahan/ vegetasi.

Gambar 2. 3
Persentase Peningkatan Tutupan Lahan/ Vegetasi



Persentase capaian peningkatan tutupan lahan/ vegetasi didapat dari perhitungan tutupan lahan diluar kawasan hutan mencakup ruang terbuka hijau, hutan rakyat, sempadan sungai dan kawasan penyangga sumber air. Indikator capaian peningkatan tutupan lahan/vegetasi mengalami kenaikan mulai dari tahun 2020 sampai tahun 2022 dengan rata-rata kenaikan sebesar 0,58%. Mengalami penurunan di tahun 2023, dikarenakan perubahan metode perhitungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan mengalami kenaikan sebesar 1,33% di tahun 2024. Indikator capaian peningkatan tutupan lahan/vegetasi tahun 2019 hanya sebesar 103,17% terus meningkat rata-rata 5,46% per tahun sehingga pada tahun 2023 tercapai angka sebesar 86,59%, dengan rata-rata capaian sebesar 77,02% per tahun.

Indikator persentase peningkatan tutupan lahan/ vegetasi mengalami kenaikan mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, terdapat perubahan target pada Renstra tahun 2024-2026 dikarenakan perubahan metode perhitungan yang disesuaikan dengan target Kebutuhan RTH Publik Kabupaten Magetan berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Magetan. Dari hasil perhitungan deliniasi tutupan lahan terdapat kenaikan jumlah luasan dari tahun 2023 sebesar 2.143,25 Ha menjadi 2.276,75 Ha di tahun 2024. Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan tetap berupaya melakukan penanaman dalam rangka penambahan tutupan lahan setiap tahunnya, salah satunya dengan Gerakan Wajib menanam Pohon bagi PNS, CPNS, P3K dan Calon pengantin serta upaya penambahan penanaman lainnya seperti di Hutan Kota tematik dan dengan partisipasi dari dunia usaha. Namun hasil dari penanaman tersebut tidak serta merta dapat menambah luasan tutupan lahan, diperlukan kurang lebih 5 tahun dalam menambah capaian tutupan lahan.



e. Persentase pemenuhan baku mutu air.

Gambar 2. 4

Persentase Pemenuhan Baku Mutu Air

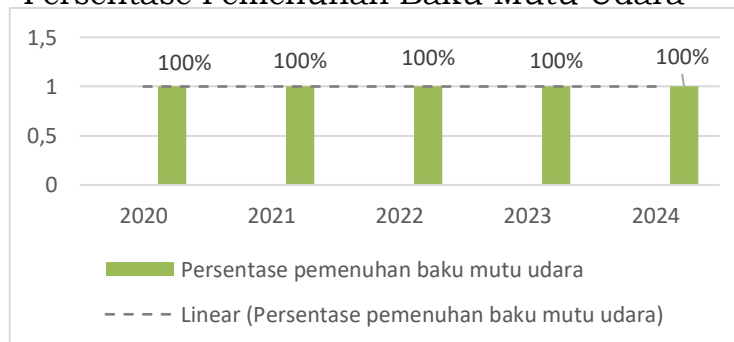


Capaian persentase pemenuhan baku mutu air mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 memiliki rata-rata capaian yang sama, hanya saja di tahun 2023 mengalami penurunan capaian di angka 93,57% dikarenakan dari 8 parameter uji kualitas air, terdapat 4 parameter yang masuk kedalam kategori tercemar ringan dan sedang. Kualitas air tersebut mengandung kotoran hewan dan manusia, serta dari limbah industri dan limbah rumah tangga (deterjen). Namun capaian berhasil naik di tahun 2024 yaitu sebesar 100%, dari hasil uji tidak ada status mutu air yang masuk ke dalam kategori tercemar sedang dan berat. Hal ini membuktikan terdapat upaya peningkatan kualitas air di Kabupaten Magetan.

f. Persentase pemenuhan baku mutu udara.

Gambar 2. 5

Persentase Pemenuhan Baku Mutu Udara



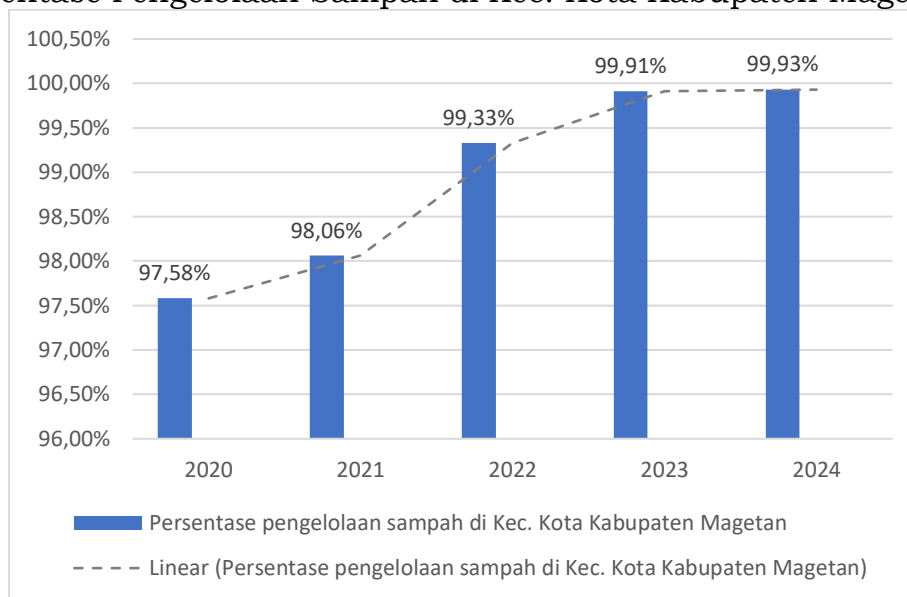
Persentase pemenuhan baku mutu udara mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 terus menunjukkan capaian sebesar 100%. Hasil dari pemantauan kualitas udara selama kurun waktu 5 tahun terakhir, semua parameter telah memenuhi baku mutu kualitas udara ambien. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas udara di Kabupaten Magetan sangat baik, tingkat pencemaran udara sangat kecil, akan tetapi harus tetap dipertahankan pemenuhan baku mutu kualitas udara ambien di Kabupaten Magetan.



g. Persentase pengelolaan sampah di Kec. Kota Kabupaten Magetan

Gambar 2. 6

Persentase Pengelolaan Sampah di Kec. Kota Kabupaten Magetan



Persentase pengelolaan sampah merupakan total volume penanganan dan pengurangan sampah. Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga diukur dengan besaran jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Perhitungan diperoleh dari persentase volume sampah yang ditangani di Ibukota Magetan dibanding dengan Volume Timbulan Sampah Ibukota Magetan. Capaian penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga diukur dengan indikator besaran penurunan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pengurangan sampah adalah jumlah sampah yang dikelola oleh masyarakat. Capaian pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga diukur dengan indikator besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga terdaur ulang dan yang termanfaatkan kembali di sumber sampah

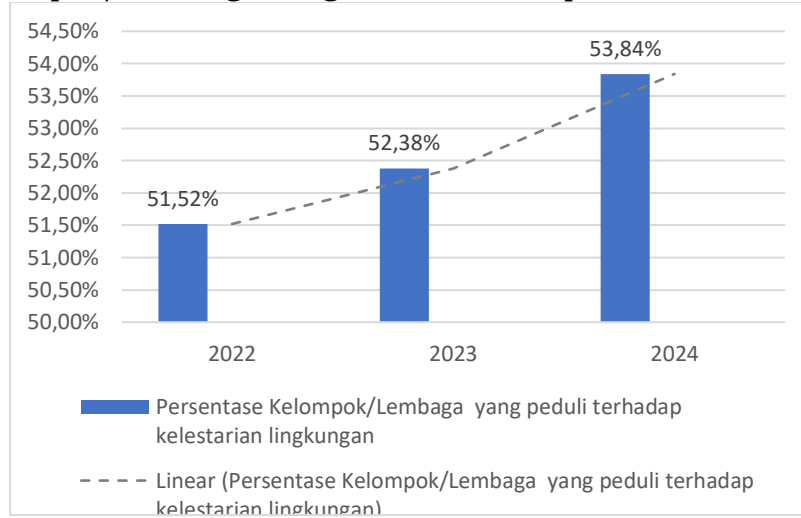
Capaian kinerja persentase pengelolaan sampah di Kec. Kota Kabupaten Magetan menunjukkan peningkatan capaian mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Pengelolaan sampah terdiri dari penanganan sampah dan pengurangan sampah. Kinerja pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan menunjukkan peningkatan secara moderat rata-rata sebesar 0,59% per tahun. Pengelolaan sampah tahun 2020 sebesar 97,58% per tahun terus naik per tahun sehingga pada tahun 2024 menjadi 99,93%. Hal ini menunjukkan perbaikan kinerja sistem pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kab. Magetan.



h. Persentase Kelompok/ Lembaga yang peduli terhadap kelestarian lingkungan

Gambar 2. 7

Persentase Kelompok/ Lembaga Yang Peduli Terhadap Kelestarian Lingkungan



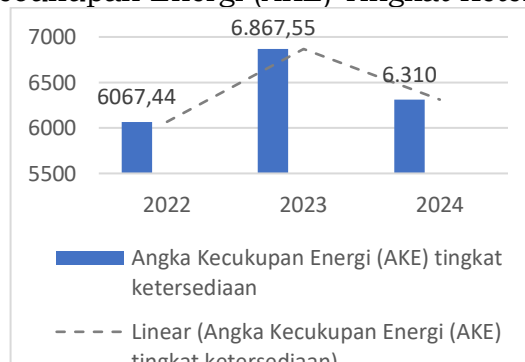
Persentase Kelompok/ Lembaga yang peduli terhadap kelestarian lingkungan didapat dari perbandingan antara jumlah Kelompok/ Lembaga yang peduli terhadap kelestarian lingkungan dibanding dengan jumlah total Lembaga yang dibina. Yang dimaksud Kelompok/ Lembaga yaitu sekolah adiwiyata, ecopesantren dan kelompok pengelola lingkungan yang berhasil mendapatkan penghargaan.

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa capaian persentase Kelompok/ Lembaga yang peduli terhadap kelestarian lingkungan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 meningkat dengan rata-rata kenaikan sebesar 1,16%. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok/ Lembaga masyarakat yang mendapatkan penghargaan terkait kelestarian lingkungan hidup meningkat, dari target yang telah ditetapkan. Artinya peran serta dan kesadaran masyarakat dalam mengelola lingkungan meningkat, sekaligus merupakan amanah bagi penerimanya, untuk tetap menjaga dan meningkatkan kepeloporan serta upaya-upaya perlindungan, pemeliharaan, dan pengelolaan lingkungan hidup.

i. Angka Kecukupan Energi (AKE) Tingkat Ketersediaan

Gambar 2. 8

Angka Kecukupan Energi (AKE) Tingkat Ketersediaan



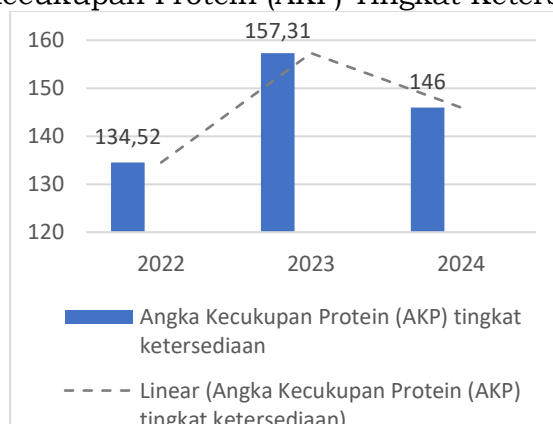


Cakupan ketersediaan energi per kapita dan protein per kapita ini mencerminkan jumlah ketersediaan pangan yang dapat dikonsumsi oleh seluruh penduduk Kabupaten Magetan dalam satu tahun. Ketersediaan energi ini diperoleh dari mengkonversi seluruh bahan pangan yang ada di Kabupaten Magetan kedalam 3 jenis gizi dibutuhkan manusia yaitu Energi, Protein, dan Lemak. Berdasarkan gambar di atas, Angka Kecukupan Energi (AKE) tingkat ketersediaan meningkat di tahun 2023 dan kemudian di tahun 2024 terdapat penurunan capaian dikarenakan produksi beberapa bahan pangan mengalami penurunan (gabah, sayuran, telur dan ikan), dampak devlasi dan menurunnya daya beli masyarakat berpengaruh pada distribusi dan penyediaan stok, produksi sapi dan daging turun karena wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), namun ketersediaan energi dan pangan sudah di atas target Nasional (WNPG) yaitu ketersediaan energi sebesar 2.400 kkal/kap/hr.

j. Angka Kecukupan Protein (AKP) Tingkat Ketersediaan

Gambar 2. 9

Angka Kecukupan Protein (AKP) Tingkat Ketersediaan



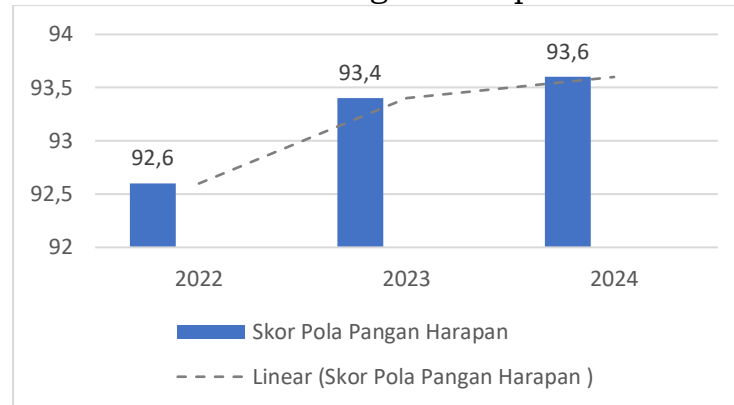
Berdasarkan gambar di atas, Angka Kecukupan Protein (AKP) tingkat ketersediaan meningkat di tahun 2023 dan kemudian di tahun 2024 terdapat penurunan capaian dikarenakan produksi beberapa bahan pangan mengalami penurunan (gabah, sayuran, telur dan ikan), dampak devlasi dan menurunnya daya beli masyarakat berpengaruh pada distribusi dan penyediaan stok, produksi sapi dan daging turun karena wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), namun ketersediaan energi dan pangan sudah di atas target Nasional (WNPG) yaitu ketersediaan protein sebesar 63 gram/kap/hr.

k. Skor Pola Pangan Harapan

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan pada sumbangan energinya, baik secara absolut maupun relatif terhadap total energi penyediaan, atau konsumsi pangan yang mampu mencukupi kebutuhan konsumsi pangan penduduk baik kuantitas, kualitas, maupun keragamannya, dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, agama, dan cita rasa.



Gambar 2. 10
Skor Pola Pangan Harapan



Pangan yang dikonsumsi secara beragam dalam jumlah cukup dan seimbang akan mampu memenuhi kebutuhan zat gizi. Keanekaragaman pangan tersebut mencakup kelompok Padi-padian, Umbi-umbian, Pangan hewani, Minyak dan lemak, Buah/biji berminyak, Kacang-kacangan, Gula, Sayur dan buah.

Jika dibandingkan dengan tahun 2023, Skor Pola Pangan Harapan mengalami kenaikan, terdapat beberapa komoditi menunjukkan tingkat kenaikan yang signifikan. Ditinjau dari sisi keanekaragaman pangan, maka konsumsi padi-padian masih di atas standar gizi/Pola Pangan Harapan (PPH) yang dianjurkan 25%. Namun kontribusi beberapa kelompok pangan perlu ditingkatkan seperti dengan melaksanakan program penganekaragaman pangan dan pengurangan konsumsi beras, khususnya di lokasi prioritas dengan skor PPH yang masih rendah.

Sebagai bagian dari evaluasi kinerja pendanaan perangkat daerah, anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan selama periode tahun 2020-2024 sebagaimana terinci pada tabel di bawah:



Tabel 2.10 (TC-24)

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kab. Magetan Tahun 2020-2024

No	Uraian (Program/Kegiatan)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	Program Tata Lingkungan	584.000.000	0	0	0	0	499.324.325	0	0	0	0	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	1.593.080.500	0	0	0	0	1.459.479.249	0	0	0	0	91,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
3	Program Pengendalian Pencemaran, Polusi dan Perusakan Lingkungan Hidup	527.747.000	0	0	0	0	514.972.089	0	0	0	0	97,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	12.324.665.094	0	0	0	0	11.160.024.595	0	0	0	0	90,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
5	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Lingkungan Hidup	2.690.000.000	0	0	0	0	2.255.154.913	0	0	0	0	83,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
6	Program Penaatan Hukum Lingkungan	102.575.250	0	0	0	0	76.718.450	0	0	0	0	74,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
7	Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	192.574.200	0	0	0	0	172.419.550	0	0	0	0	89,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
8	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	395.000.000	0	0	0	0	333.049.157	0	0	0	0	84,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-



No	Uraian (Program/Kegiatan)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Angga ran	Rea lisa si
9	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	110.000.000	0	0	0	0	86.739.869	0	0	0	0	78,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
10	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	45.000.000	0	0	0	0	8.709.575	0	0	0	0	19,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
11	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	25.000.000	0	0	0	0	23.626.600	0	0	0	0	94,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
12	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	0	1.199.691.000	0	0	0	0	1.199.691.000	0	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	0	462.773.250	255.000.000	626.930.000	635.000.000	0	444.999.650	251.150.535	625.475.000	634.888.677	0,00	96,16	98,49	99,77	99,98	11,12	12,58
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	0	498.334.875	1.802.668.700	1.390.000.000	385.000.000	0	469.392.116	1.787.800.615	1.305.930.230	382.953.960	0,00	94,19	99,18	93,95	99,47	-8,24	-6,56

RENSTRA (Rencana Strategis)

Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kab. Magetan
Tahun 2025-2029



No	Uraian (Program/Kegiatan)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Angga ran	Rea lisa si
3	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	0	1.118.917.422	3.072.515.923	2.294.028.500	1.200.000.300	0	990.608.915	2.872.705.467	2.207.354.907	1.121.623.007	0,00	88,53	93,50	96,22	93,47	2,36	4,23
4	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	0	20.455.100	25.000.000	50.000.000	67.000.000	0	19.680.180	24.976.000	26.703.110	65.348.200	0,00	96,21	99,90	53,41	97,53	48,51	49,19
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	0	97.349.950	110.000.000	76.295.000	40.000.000	0	87.142.700	93.989.660	73.006.123	39.671.500	0,00	89,51	85,45	95,69	99,18	-25,66	-23,07
6	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	0	50.000.000	24.000.000	4.893.000	20.000.000	0	49.179.900	22.302.077	4.719.000	19.404.326	0,00	98,36	92,93	96,44	97,02	-26,32	-26,66



No	Uraian (Program/Kegiatan)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
7	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	0	200.000.000	440.625.000	258.394.000	190.000.000	0	173.218.930	419.161.692	246.908.438	187.717.667	0,00	86,61	95,13	95,56	98,80	-1,70	2,72
8	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	0	0	50.000.000	40.510.000	30.000.000	0		46.131.850	34.676.500	28.595.580	0,00	0,00	92,26	85,60	95,32	-22,54	-21,27
9	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	0	0	20.000.000	30.200.000	30.000.000	0	0	18.346.450	30.090.700	29.966.500	0,00	0,00	91,73	99,64	99,89	22,47	27,80
10	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	0	3.535.740.125	5.012.475.000	4.935.410.000	2.133.587.268	0	3.268.541.625	4.810.860.836	4.379.421.014	1.980.734.173	0,00	92,44	95,98	88,73	92,84	-15,50	-15,38
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	12.231.194.657	13.266.145.847	13.362.626.788	15.300.848.215	0	11.296.331.351	13.113.352.265	13.217.401.813	14.746.736.629	0,00	92,36	98,85	98,91	96,38	7,75	9,29



No	Uraian (Program/Kegiatan)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Angga ran	Rea lisa si
12	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	0	0	0	0	80.000.000	0	0	0	0	79.928.700	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	-	-
13	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	0	0	0	0	400.000.000	0	0	0	0	394.515.300	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	-	-
14	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	0	0	0	0	255.000.000	0	0	0	0	245.572.550	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30	-	-
15	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	0	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	47.117.744	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24	-	-
	TOTAL	18.589.642.044	19.414.456.379	24.078.430.470	23.069.287.288	20.816.435.783	16.590.218.371	17.998.786.367	23.460.777.447	22.151.686.835	20.004.774.513	89,24	92,71	97,43	96,02	96,10	2,87	4,79



2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan memiliki dua urusan utama, yaitu Urusan Lingkungan Hidup dan Pangan. Dalam menyusun program dan strategi pembangunan, Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan perlu memperhatikan kelompok sasaran yang menjadi prioritas utama, yaitu:

1. Lembaga Swasta dan Dunia Usaha:
 - Industri/ usaha untuk kegiatan pengawasan dan pemantauan penerapan standar baku mutu limbah (IPAL), efisiensi energi, produksi bersih dan juga mendukung program penghijauan, konservasi air, serta pengelolaan sampah terpadu melalui CSR inisiatif ekonomi hijau dan offtaker.
 - Perusahaan BUMN/BUMD mendukung program penghijauan, konservasi air, serta pengelolaan sampah terpadu melalui CSR.
 - Asosiasi bisnis/industri untuk mendukung program penghijauan, konservasi air, serta pengelolaan sampah terpadu melalui CSR inisiatif ekonomi hijau.
2. Lembaga Pendidikan:
 - Perguruan tinggi (universitas, politeknik) untuk mendukung pengembangan penelitian dan pengabdian masyarakat tentang dampak lingkungan, teknologi energi terbarukan, teknologi pengolahan limbah.
 - Lembaga penelitian (BRIN, lembaga riset daerah) membantu melalui implementasi riset biodiversitas, mitigasi perubahan iklim, monitoring kualitas udara dan air, pengembangan teknologi ramah lingkungan.
 - Sekolah (SD-SMA) dan pesantren mendukung melalui penerapan program Adiwiyata untuk pendidikan lingkungan.
3. Lembaga dan Komunitas Masyarakat:
 - Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) TPS3R dan Bank Sampah yaitu kelompok pengelola sampah berbasis masyarakat
 - Kelompok Tani, Kelompok Wanita tani, Karang Taruna dan PKK, sebagai bagian tim penggerak edukasi lingkungan di tingkat desa/kelurahan.
 - LSM lingkungan, seperti WALHI, *Greenpeace*, WWF Indonesia, yang berperan dalam mendukung advokasi, edukasi, dan kampanye publik tentang perlindungan lingkungan, konservasi lingkungan, dll.
 - Kelompok pegiat lingkungan (Kalpataru, Sakakalpataru,) mendukung kegiatan reboisasi, konservasi, dan edukasi lapangan tentang pengelolaan lingkungan.
 - Media massa (cetak, elektronik, online), sebagai mitra dalam kampanye lingkungan, penyebaran informasi, dan peningkatan kesadaran publik tentang cinta lingkungan.
 - Komunitas digital (influencer, platform sosial media lingkungan, startup hijau), dalam mendukung gerakan eco-lifestyle dan edukasi publik secara luas



2.1.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

Mitra Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan dalam memberikan pelayanan antara lain::

- Kementerian Lingkungan Hidup untuk kegiatan mendukung penyusunan kebijakan, regulasi, dan supervisi teknis bidang lingkungan hidup.
- Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang (PUPR) untuk kebijakan dan kegiatan pengelolaan air, drainase, persampahan, dan ruang terbuka hijau.
- Kementerian Kehutanan untuk kegiatan mendukung penyusunan kebijakan, regulasi, dan supervisi teknis bidang kehutanan.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk mendukung kegiatan pengelolaan persampahan.
- Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.
- Dinas Kesehatan untuk kegiatan kampanye isu pencemaran lingkungan dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat.
- Dinas Perindustrian & Perdagangan untuk kegiatan pengendalian limbah industri.
- Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan untuk kegiatan pemenuhan produksi pangan, pemanfaatan kompos, dan pengendalian pencemaran air, tanah dan udara, pengendalian alih fungsi tata guna lahan.
- Dinas Peternakan dan Perikanan untuk kegiatan untuk kegiatan pemenuhan produksi pangan dan pengendalian pencemaran air, tanah dan udara.
- Dinas Pariwisata untuk kegiatan pengembangan ekowisata berwawasan lingkungan.
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk kegiatan pengendalian pencemaran air, tanah dan udara, menjaga stabilitas harga pangan, pemenuhan ketersediaan pangan.
- Laboratorium Lingkungan untuk kegiatan pengujian air, udara dan tanah.

2.1.6. Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

- Penyediaan air bersih & sanitasi, melalui BUMD Perumdam Lawu Tirta Kab. Magetan bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan dalam pengendalian kualitas air, konservasi resapan air, serta pemantauan pencemaran sungai.
- Rehabilitasi lingkungan, pemberian dukungan Dana dari CSR BUMD dapat dialokasikan untuk kegiatan penghijauan, konservasi DAS dan ekowisata berbasis masyarakat.

2.1.7. Kerjasama Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

- Pengelolaan Sungai dan DAS, kerja sama antara Kabupaten/Kota dalam satu daerah aliran sungai.
- Konservasi kawasan lindung, perlindungan hutan lindung yang mencakup lebih dari satu daerah.
- Pengelolaan limbah cair industri, Limbah B3 dan sampah.



2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan perannya, Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan bertugas mendukung Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan lingkungan hidup dan pangan yang termasuk dalam kewenangan daerah serta tugas pembantuan. Pada praktiknya, sering muncul kesenjangan antara keadaan saat ini dengan kondisi yang diharapkan, yang kemudian dikategorikan sebagai permasalahan. Adapun permasalahan yang dihadapi, bila ditinjau dari urusan yang menjadi tanggung jawab Dinas, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup masih menghadapi tekanan yang cukup signifikan seiring dengan meningkatnya aktivitas pembangunan, pertumbuhan penduduk, dan perubahan pemanfaatan ruang. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya potensi pencemaran air, udara, dan tanah serta menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan. Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup belum sepenuhnya berjalan optimal, baik dari aspek pengendalian pencemaran, konservasi sumber daya alam, maupun peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat serta pelaku usaha terhadap ketentuan lingkungan hidup.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) memiliki tren yang fluktuatif. Ditahun 2022 nilai IKLH sebesar 64,78, kemudian turun di tahun 2023 menjadi 64,43. Sedangkan di tahun 2024 tercatat sebesar 67,29, menunjukkan tren perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, namun masih berada dalam kategori “sedang” sehingga memerlukan peningkatan pada aspek pengendalian pencemaran dan pengelolaan sumber daya alam. Beberapa komponen penyusun IKLH, seperti Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Lahan, masih menunjukkan nilai yang relatif rendah antara lain Indeks Kualitas Lahan yang berada pada angka 36,72, yang mengindikasikan bahwa kondisi lahan, daya dukung lingkungan dan kualitas ekosistem belum sepenuhnya pulih dan berfungsi optimal. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kebutuhan untuk memperkuat upaya konservasi, rehabilitasi lingkungan, serta peningkatan kapasitas pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan.

Kualitas Lingkungan hidup merupakan salah satu isu yang perlu diperhatikan, dipantau dan diupayakan terus untuk meningkatkan serta mempertahankan kualitas lingkungan hidup di masa mendatang.

2. Cakupan Pengelolaan Sampah Belum Merata

Persoalan sampah merupakan isu yang terus dikembangkan solusinya karena jumlahnya semakin bertambah. Permasalahan sampah di Kabupaten Magetan memang sudah ada dan menjadi masalah yang belum benar-benar tuntas. Timbulan sampah berkaitan erat dengan jumlah penduduk, bertumbuhnya



pembangunan dan gaya hidup masyarakat. Berubahnya gaya hidup/ konsumerisme masyarakat akan berpengaruh terhadap jumlah dan jenis sampah yang dihasilkan, selain itu berkembangnya jumlah penduduk berdampak produksi sampah akan semakin meningkat.

Peningkatan timbulan sampah di Kabupaten Magetan secara langsung berdampak pada menurunnya kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Milangasri dalam menampung volume sampah harian, yang rata-rata mencapai $\pm 150-200 \text{ m}^3$ per hari. TPA Milangasri yang dibangun pada Tahun 1997 dengan luas awal 2,5 ha telah mengalami kelebihan kapasitas (overload), sehingga pada Tahun 2011 dilakukan perluasan sebesar 1,5 ha. Perluasan TPA dengan kapasitas itu dibangun dengan asumsi masa pakai TPA selama 8 tahun, kenyataannya kapasitas tersebut tetap tidak mampu mengimbangi laju timbulan sampah yang terus meningkat. Sebagai upaya lanjutan, pemerintah melakukan perluasan kembali hingga mencapai total luas 4,2 ha. Namun demikian, pada Tahun 2024 kapasitas tampung TPA Milangasri tercatat telah berada pada kondisi kritis dengan sisa daya tampung kurang dari 10% dari kapasitas optimal.

Di sisi lain Pemerintah Kabupaten Magetan telah berupaya mengatasi permasalahan tersebut dengan memanfaatkan lahan untuk TPA dan sebagai Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang berlokasi di Desa Botok Kecamatan Karas, namun saat ini pembangunan TPA pengganti belum terbangun.

Laju timbulan sampah yang tinggi tidak sebanding dengan peningkatan kapasitas pengelolaan akhir, sehingga mendorong perlunya strategi pengurangan sampah dari hulu dan pengelolaan yang lebih terintegrasi.

3. Belum Terpenuhinya Target RTH Publik

Pemenuhan atas tutupan lahan masih menjadi permasalahan penting di Kabupaten Magetan. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Magetan kebutuhan 20% RTH Publik Ruang Terbuka Hijau wilayah perkotaan Kabupaten Magetan adalah seluas 3.529,80 Ha. Pada tahun 2024 yang sudah diinventarisasi ke dalam RTH Publik yaitu seluas 2.810,155 Ha dengan capaian sebesar 15,92%, masih belum mencapai target yang ditetapkan dikarenakan masih kurangnya identifikasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta perkembangan tata guna lahan selain RTH yang memiliki prioritas lebih baik untuk kemajuan daerah. Dalam rangka pemenuhan RTH publik, salah satunya direncanakan melalui pembangunan Eco Bamboo Park di lahan seluas $\pm 18,5$ hektar yang diharapkan dapat menanggulangi kerusakan lahan dan dapat menyerap gas rumah kaca CO₂ sebesar 50 ton/tahun pada 1 hektar tanaman bambu. Selain berfungsi untuk pemenuhan RTH, penanaman bambu ini merupakan upaya rehabilitasi lahan dan konservasi tanah secara intensif untuk mengembalikan fungsi tanah.



Pelaksanaan penanaman telah dilaksanakan, namun diperkirakan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang baru dapat memenuhi perhitungan tutupan lahan. Pemenuhan RTH publik perlu menjadi perhatian serius melalui perencanaan yang terintegrasi, penguatan kebijakan perlindungan lahan, serta kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat, agar keberadaan RTH publik dapat ditingkatkan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

4. Pengembangan diversifikasi pangan alternatif masih rendah

Pengembangan diversifikasi pangan alternatif di Kabupaten Magetan masih tergolong rendah, meskipun pola konsumsi masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin beragam. Hal ini tercermin dari nilai skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi, di mana kelompok padi-padian tidak mencapai skor maksimal, sementara kelompok umbi-umbian mampu memenuhi skor maksimal. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat Magetan tidak sepenuhnya bergantung pada beras dan telah memanfaatkan sumber pangan non-beras sebagai bagian dari pola konsumsi sehari-hari.

Namun jika ditinjau dari sisi ketersediaan pangan, hasil analisis neraca bahan makanan menunjukkan bahwa skor PPH pada tingkat ketersediaan belum mencapai skor maksimal pada beberapa kelompok bahan makanan strategis, antara lain umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, serta sayur dan buah-buahan. Padahal, kelompok bahan makanan tersebut justru telah mencapai atau mendekati skor maksimal pada tingkat konsumsi. Adanya kesamaan kelompok bahan makanan yang belum optimal pada PPH ketersediaan maupun PPH konsumsi menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap pangan alternatif tersebut belum sepenuhnya dipenuhi dari produksi dan pasokan lokal.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa keragaman konsumsi pangan masyarakat Magetan lebih banyak ditopang oleh pasokan dari luar daerah, bukan hasil dari pengembangan sistem pangan alternatif lokal yang kuat dan berkelanjutan. Dengan demikian, meskipun konsumsi pangan masyarakat sudah relatif beragam, pengembangan diversifikasi pangan alternatif di Kabupaten Magetan masih lemah pada aspek penyediaan, produksi, dan penguatan rantai pasok lokal, sehingga berpotensi menimbulkan kerentanan ketersediaan pangan serta ketergantungan terhadap daerah lain dalam jangka panjang.

5. Pemenuhan Konsumsi Pangan pangan belum sesuai

Pemenuhan konsumsi pangan penduduk di Kabupaten Magetan masih belum sepenuhnya sesuai dengan standar kecukupan gizi yang ditetapkan. Berdasarkan hasil analisis konsumsi pangan tahun 2024, rata-rata konsumsi energi penduduk tercatat sebesar 1.992,8 kkal per kapita per hari. Angka tersebut masih berada di bawah standar kecukupan energi yang diharapkan,

yaitu sebesar 2.150 kkal per kapita per hari, sehingga menunjukkan adanya potensi ketidakseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan energi harian masyarakat.

Di sisi lain, konsumsi protein penduduk Kabupaten Magetan telah mencapai 65,3 gram per kapita per hari, yang berada di atas standar kecukupan protein ideal sebesar 57 gram per kapita per hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan protein secara kuantitas relatif sudah memadai, namun belum diimbangi dengan kecukupan asupan energi dari sumber pangan yang beragam dan seimbang.

Ketidaksesuaian antara kecukupan energi dan protein tersebut mengindikasikan bahwa pola konsumsi pangan masyarakat masih perlu ditingkatkan dari sisi keseimbangan dan keragaman. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan edukasi gizi, diversifikasi sumber pangan, serta peningkatan akses masyarakat terhadap pangan yang cukup, bergizi, dan seimbang guna mendukung peningkatan kualitas konsumsi pangan secara berkelanjutan.

6. Kerawanan pangan

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/ Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Tahun 2025 menunjukkan bahwa Kabupaten Magetan memiliki nilai indeks ketahanan pangan (IKP) 75,28 dengan kategori wilayah Tahan Pangan. Dari nilai IKP tersebut, Kabupaten Magetan mendapatkan peringkat ke-4 di Jawa Timur dan peringkat ke-99 secara nasional. Jika melihat capaian nilai dan peringkat yang ada, maka Kabupaten Magetan termasuk wilayah yang sudah cukup baik dalam kaitannya dengan ketahanan pangan.

Namun demikian, kewaspadaan dan kesiapsiagaan jika sewaktu-waktu terjadi keadaan yang tidak diinginkan, kondisi tahan pangan itu tidak bisa dikatakan 100% aman dan kita dituntut untuk senantiasa waspada. Oleh karena itu terdapat sistem yang dijalankan Pemerintah Indonesia yakni Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dengan tiga aspek indikator yaitu aspek ketersediaan, aspek keterjangkauan, dan aspek pemanfaatan pangan. Namun demikian, permasalahan utama yang sering menjadi kendala adalah ketiadaan data yang dibutuhkan. Selain itu, respon pemenuhan data yang kurang cepat menjadi kendala tersendiri dalam proses pengerjaan aplikasi SKPG maupun proses analisa kondisi kerawanan pangan di wilayah Kabupaten Magetan.

Untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Magetan tidak hanya bergantung dari satu atau dua instansi saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab banyak pihak untuk turut serta bahu membahu merealisasikannya. Ketahanan pangan tidak hanya makanan tersedia, tetapi juga makanan harus bisa dijangkau oleh semua kalangan masyarakat dan dimanfaatkan dengan tepat untuk pemenuhan gizi tubuh sesuai rentang usia.



2.2.2. Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan serta kinerja pelayanan Perangkat daerah, maka dapat dirumuskan isu strategis yang akan menjadi fokus utama Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

Isu strategis merupakan permasalahan yang belum tertangani secara optimal pada periode perencanaan lima tahun sebelumnya dan menjadi hal yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) periode saat ini. Selain itu, isu strategis juga mencakup potensi permasalahan maupun peluang yang perlu diantisipasi guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan di masa mendatang. Penetapan isu strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan didasarkan pada hasil rewiu terhadap berbagai aspek strategis, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 10 Perumusan Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu Klhs Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)
<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Kabupaten Magetan telah melaksanakan berbagai aksi mitigasi perubahan iklim yang berkontribusi pada penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Adanya pengembangan sistem dan regulasi pengelolaan persampahan, penerapan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) serta pembangunan teknologi 	Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan Pencemaran dan kerusakan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Dukungan peningkatan Pencapaian kinerja SDG's untuk Goal 13 (perubahan iklim) dan 15 (ekosistem darat). 	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan indikator Indeks ekonomi Hijau belum dalam pembangunan belum utuh dilakukan. Penerapan Porsi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam Bauran Energi Primer belum tersedia data dan targetnya. Pencapaian kinerja lingkungan hidup nasional, hanya 1 tercapai dari 6 IKU yang ditetapkan. 	<ul style="list-style-type: none"> Penurunan daya dukung lingkungan karena perkembangan permukiman penduduk. Perlindungan kawasan-kawasan konservasi lingkungan yang masih rendah. Peningkatan rehabilitasi kawasan sumber air dan lahan kritis. Penurunan cakupan keanekaragaman hayati di daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan regulasi dan kebijakan daerah berbasis lingkungan. Perkembangan inovasi teknologi lingkungan berupa teknologi ramah lingkungan, seperti teknologi daur ulang dan energi terbarukan. Peran serta masyarakat dan kolaborasi multipihak, untuk program edukasi, pemberdayaan, dan kolaborasi dengan komunitas lokal, perguruan tinggi, serta sektor swasta dalam upaya konservasi dan pengelolaan lingkungan. Integrasi pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan daerah, penguatan mainstreaming isu



Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu Klhs Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)
pengolahan sampah						lingkungan dalam RPJMD, RKPD, hingga Renstra OPD, sehingga arah pembangunan lebih berwawasan lingkungan. <ul style="list-style-type: none"> • Perkembangan sistem data dan monitoring lingkungan berbasis digital. • Penanganan/konservasi lahan kritis. • Peningkatan pengendalian tata ruang dan penegakan Perda RTRW. • Rehabilitasi lingkungan akibat alih fungsi.
	Cakupan Pengelolaan Sampah Belum Merata	Peningkatan Pencemaran dan kerusakan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem manajemen tata kelola sampah yang menjadi energi terbarukan. • Peningkatan kualitas tata 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan TPS3R skala lingkungan untuk pengelolaan sampah. • Peningkatan sistem 	<ul style="list-style-type: none"> • pengurangan timbulan sampah belum tercapai. • Partisipasi masyarakat dalam memilah dan mengolah 	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi Instruksi Bupati tentang Pembentukan kelompok kerja pengelolaan sampah, fasilitasi TPS3R dan bank sampah, dan alokasi anggaran operasional di



Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu Klhs Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)
			<p>kelola kota dan pemukiman yang berkelanjutan (SDG's goal 11).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan ekonomi sirkular pada manajemen persampahan untuk mendukung SDG's goal 8 yaitu penyediaan pekerjaan layak. 	<p>manajemen persampahan terpadu mencakup 3R, yaitu Reduce (pengurangan), Reuse (pemanfaatan kembali) dan Recycle (daur ulang).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan ekonomi sirkular pada sistem manajemen persampahan dan sekaligus peningkatan ekonomi produktif warga perkotaan. • Pengembangan sistem bank sampah berbasis 	<p>sampah masih rendah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Daya tampung TPA makin <i>overload</i>. 	<p>setiap desa dan kelurahan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas TPA Milangasri dengan penggunaan teknologi <i>landfill mining</i>. • Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah TPA/TPST Botok. • Pengembangan teknologi ramah lingkungan untuk mengurangi volume sampah dan menghasilkan nilai tambah ekonomi. • Pengembangan sistem pengelolaan terpadu (TPST) berbasis kawasan. • Kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam Pengelolaan Sampah dan pendanaan



Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu Klhs Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)
				komunitas perkotaan. • Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengolahan melalui 3R berbasis komunitas.		pembangunan fasilitas pengolahan sampah.
	Belum Terpenuhinya Target RTH Publik	Peningkatan Pencemaran dan kerusakan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan peningkatan Pencapaian kinerja SDG's untuk Goal 13 (perubahan iklim) dan 15 (ekosistem darat). • Peningkatan kualitas tata kelola kota dan pemukiman yang berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan indeks hijau dan biru Indonesia di daerah. • Pengetatan tata ruang untuk RTH di dalam RTRW. • Pengendalian pengeluaran izin prinsip dan pembangunan kawasan perumahan yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan urbanisasi berpotensi mengganggu luasan dan manfaat RTH perkotaan. • Peningkatan kesadaran dan partisipasi warga dalam membangun RTH privat. • Pengendalian pemanfaatan ruang, terutama 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan lahan untuk RTH Publik terbatas. • Implementasi peraturan bupati untuk gerakan wajib menanam perlu ditingkatkan. • Kesadaran masyarakat terhadap RTH sebagai ruang hidup bersama dan ruang belajar masih rendah. • Pengembangan keanekaragaman hayati di RTH.



Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu Klhs Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)
			(SDG's goal 11).	memberikan penyediaan RTH privat. • Pemanfaatan RTH sebagai ruang publik untuk kesetaraan sosial yang inklusif melalui ruang terbuka ramah anak, dll.	untuk pemenuhan RTH Privat bagi perumahan di dalam Izin Prinsip. • Peningkatan peran dan fungsi RTH sebagai ruang sosial inklusif dan sumber-sumber belajar di luar ruang bagi masyarakat.	
Ketersediaan dan cadangan pangan daerah serta pengembangan pangan lokal	Pengembangan diversifikasi pangan alternatif masih rendah	Rendahnya akses jaminan sosial dan kesejahteraan petani	<ul style="list-style-type: none"> • Ketahanan pangan untuk mengakhiri kelaparan (SGD's goal 2). • Masyarakat Hidup Sehat dan Sejahtera (SGD's goal 3). • Gerakan melakukan 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerakan ketahanan pangan alternatif agar tidak hanya bertumpu pada beras, tetapi harus mengutamakan diversifikasi pangan berbasis 	<ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan keragaman pangan alternatif masih rendah. • Pemanfaatan lingkungan sebagai area pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan masyarakat dalam mengolah pangan. • Pengembangan rumah B2SA terbatas. • Pemanfaatan pangan berbasis potensi lokal, seperti umbi-umbian, sorgum, sagu, jagung, dan kacang-kacangan



Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu Klhs Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)
			<p>konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab dalam keluarga (SGD's goal 12).</p>	<p>sumber daya lokal.</p> <ul style="list-style-type: none"> Gerakan Kampung Pangan Lestari, Lumbung Pangan Masyarakat, dan Gerakan <i>One Day No Rice</i>. 	<p>pangan alternatif masih rendah.</p> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kecukupan pangan bergizi, baik energi maupun protein berkapita penduduk, masih rendah. Masih adanya daerah kerawanan pangan sebagai dampak rendahnya keragaan pangan olahan alternatif. Pola konsumsi pangan masyarakat yang masih mengandalkan nasi sebagai sumber karbohidrat dengan 	<p>sebagai substitusi beras dan terigu.</p> <ul style="list-style-type: none"> Inovasi teknologi pengolahan pangan yang lebih praktis, bergizi, dan bernilai tambah.



Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu Klhs Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)
					mengesampingkan kecukupan protein.	
	Pemenuhan Konsumsi Pangan pangan belum sesuai		<ul style="list-style-type: none"> Gerakan melakukan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab dalam keluarga (SGD's goal 12). 	<ul style="list-style-type: none"> Daya beli dan kesejahteraan masyarakat belum merata 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerataan pendapatan masyarakat. Peningkatan keamanan pangan. 	<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan kepatuhan terhadap registrasi keamanan pangan. Pengawasan keamanan pangan
	Kerawanan pangan		<ul style="list-style-type: none"> Ketahanan pangan untuk mengakhiri kelaparan (SGD's goal 2). 	<ul style="list-style-type: none"> Potensi ketahanan pangan belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan akses pangan merata. Pemenuhan cadangan ketersediaan pangan oleh pemerintah desa 	<ul style="list-style-type: none"> Bantuan pangan daerah rawan pangan Pemenuhan Cadangan pangan oleh pemerintah daerah dan desa

**BAB
3**

**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH
KEBIJAKAN**

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan mempunyai kewajiban untuk membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan tidak hanya didasarkan pada tugas dan fungsi kelembagaan, tetapi juga harus mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pada periode RPJMD baru ini, Visi pembangunan daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025–2029, sebagaimana Visi Kepala Daerah terpilih, adalah:

“MAGETAN NYAMAN, MAJU, DAN BERKELANJUTAN”

MAGETAN NYAMAN, mencerminkan harapan untuk menciptakan kehidupan yang aman, tenteram, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Kabupaten Magetan. Kata "nyaman" mencakup aspek sosial, ekonomi, lingkungan dan psikologis.

MAGETAN MAJU, mencerminkan tekad untuk mengantarkan Kabupaten Magetan menjadi wilayah yang berkembang pesat dalam berbagai aspek, baik ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan hingga peningkatan kualitas hidup masyarakat.

MAGETAN BERKELANJUTAN, mencerminkan komitmen Kabupaten Magetan untuk melaksanakan pembangunan yang memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Magetan tahun 2025-2029 tersebut di atas akan dapat terwujud dengan serangkaian Misi sebagai berikut:

1. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Andal dan Berdaya Saing Kuat.
2. Mengembangkan Sektor Pertanian, mendorong hilirisasi produk unggulan berbasis UMKM, Koperasi untuk memantapkan perekonomian daerah yang berkelanjutan.
3. Membangun Birokrasi Pemerintahan yang profesional, responsif, adaptif, dan transparan.
4. Meningkatkan Kesejahteraan dengan pengentasan Kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat, perlindungan sosial dan pembangunan wilayah perdesaan.
5. Peningkatan daya tarik investasi, ekonomi kreatif, pariwisata, perluasan lapangan kerja, dan menumbuhkan kewirausahaan untuk mengurangi pengangguran.



6. Membangun Infrastruktur Strategis untuk Meningkatkan Keterhubungan antar Wilayah.
7. Membangun Kehidupan masyarakat yang “Guyub Rukun”, aman, tenteram, berasaskan nilai agama dan budaya serta menjaga harmoni lingkungan hidup dan mendorong pengembangan ekonomi hijau.

Dalam kerangka perencanaan strategis, Misi Politis sejumlah 7 misi sebagaimana telah dijelaskan di atas, ditransformasikan menjadi 4 tujuan guna menyederhanakan penyusunan arsitektur kinerja pembangunan. Proses transformasi ini dilakukan dengan tetap mempertahankan esensi dan makna orisinal dari masing-masing Misi Kepala Daerah. Secara lengkap diuraikan dalam tabel berikut:

VISI		MAGETAN NYAMAN, MAJU, DAN BERKELANJUTAN	
MISI	TUJUAN	SASARAN	
1. Membangun SDM yang Andal dan Berdaya Saing Kuat 7. Membangun Kehidupan Masyarakat yang Guyup Rukun, Aman, Tenteram berasaskan Nilai Agama dan Budaya serta Menjaga Harmoni Lingkungan Hidup dan Mendorong Pengembangan Ekonomi Hijau	Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis	1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan	
		2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	
		3. Meningkatnya Pembangunan Berwawasan Kependudukan	
		4. Terciptanya Kerukunan dan Kegotongroyongan dalam Keberagaman Sosial Budaya Masyarakat	
2. Mengembangkan Sektor Pertanian, Mendorong Hilirisasi Produk Unggulan Berbasis UMKM, Koperasi untuk Memantapkan Perekonomian Daerah Yang Berkelanjutan 5. Peningkatan Daya Tarik Investasi, Ekonomi Kreatif, Pariwisata, Perluasan Lapangan Kerja dan Menumbuhkan Kewirausahaan untuk Mengurangi Pengangguran 6. Membangun Infrastruktur Strategis untuk Meningkatkan Keterhubungan Antar Wilayah 7. Membangun Kehidupan masyarakat yang “Guyub Rukun”, aman, tenteram, berasaskan nilai agama dan budaya serta menjaga harmoni lingkungan hidup dan mendorong pengembangan ekonomi hijau.	Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan	1. Meningkatnya Investasi Daerah	
		2. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	
		3. Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Unggulan	
		4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan yang Berkelanjutan	
		5. Menurunnya Angka Pengangguran melalui Perluasan Lapangan Kerja dan Menumbuhkan Kewirausahaan	
		6. Menurunnya Tingkat Resiko Bencana	
3. Membangun Birokrasi Pemerintahan yang Profesional, Responsif, Adaptif dan Transparan	Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Profesional, Responsif, Adaptif dan Transparan	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	
		2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	
		3. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik	
		4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	



VISI	MAGETAN NYAMAN, MAJU, DAN BERKELANJUTAN	
MISI	TUJUAN	SASARAN
		5. Meningkatnya Kualitas ASN 6. Meningkatnya Daya Saing dan Inovasi Daerah
4. Meningkatkan Kesejahteraan dengan pengentasan Kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat, perlindungan sosial dan pembangunan wilayah perdesaan	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	1. Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah 2. Meningkatkan Kesejahteraan Inklusif Masyarakat

Sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan dalam urusan pangan berperan dalam mendukung misi ke 2 yaitu **“Mengembangkan Sektor Pertanian, mendorong hilirisasi produk unggulan berbasis UMKM, Koperasi untuk memantapkan perekonomian daerah yang berkelanjutan”** dan misi ke 4 yaitu **“Meningkatkan Kesejahteraan dengan pengentasan Kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat, perlindungan sosial dan pembangunan wilayah perdesaan”**.

Untuk urusan Lingkungan Hidup berperan dalam mendukung misi ke 7 yaitu **“Membangun Kehidupan masyarakat yang “Guyub Rukun”, aman, tenteram, berasaskan nilai agama dan budaya serta menjaga harmoni lingkungan hidup dan mendorong pengembangan ekonomi hijau”**.

Dalam misi ke 2 dan 7 tersebut Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan mendukung pencapaian Tujuan ke-2, yaitu **“Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan”**, dengan sasaran **“Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Unggulan”** dan **“Meningkatnya Kualitas Lingkungan yang Berkelanjutan”**.

Dalam misi ke 4 Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan mendukung pencapaian Tujuan ke-4, yaitu **“Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat”**, dengan sasaran **“Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat”**. Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah ini dimaksudkan untuk mempermudah penetapan indikator kinerja dan target tahunan secara terarah dan terukur. Tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3. 1
Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan 2025-2030

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<p>NSPK:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan kewenangan pemerintah daerah urusan Lingkungan Hidup dan Pangan <p>Sasaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Kualitas Lingkungan yang berkelanjutan Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Unggulan Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat 	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks	70,71	70,79	70,87	70,94	71,02	71,10
			Indeks Ketahanan Pangan Indeks	75,34	75,76	76,23	76,71	77,19	77,67
		Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah	Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks	69,88	69,98	70,08	70,18	70,28	70,38
			Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks	80,88	80,98	81,08	81,18	81,28	81,38
			Indeks Kualitas Lahan (IKL) Indeks	53,33	53,33	53,33	53,33	53,33	53,34
		Terwujudnya Ketersediaan, akses, dan konsumsi Pangan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah [IKPS] Indeks	72,420	72,430	72,440	72,445	72,450	72,460
			Rasio Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan %	110	110	110	110	110	110
			Pravelensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Pravelence of Undernourishment) Skor	7,81	7,50	7,18	6,87	6,56	6,25
		Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	Skor PPH Konsumsi Skor	93,90	94,30	94,60	94,90	95,40	95,80
			Nilai SAKIP Nilai	93,35	93,36	93,37	93,38	93,39	93,40
			Indeks Kepuasan Masyarakat Skor	83,03	83,04	83,05	83,06	83,07	83,08



3.2. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Pencapaian tujuan dan sasaran dilakukan melalui serangkaian perumusan strategi dan kebijakan perangkat daerah yang sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang perangkat daerah. Perumusan masalah juga harus dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan keselarasan pelaksanaan strategi dan arah kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang sudah tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Strategi dan arah kebijakan perangkat daerah juga harus didasarkan pada pertimbangan terhadap pentahapan Renstra yang disusun oleh perangkat daerah.

Tabel 3. 2
Penahapan Strategi Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Urusan Lingkungan Hidup				
Pengembangan sistem tata kelola lingkungan hidup dan manajemen persampahan yang inklusif dan partisipatif	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku tata kelola lingkungan hidup dan masyarakat	Penguatan dan penegakan regulasi melalui pencegahan dan penindakan oleh lembaga yang didukung SDM aparatur yang kompeten	Integrasi teknologi ramah lingkungan dan energi terbarukan dalam implementasi lingkungan hidup pada sistem manajemen lingkungan hidup dan persampahan berbasis partisipasi masyarakat	Penguatan sistem manajemen lingkungan hidup dan persampahan berbasis Ekonomi Sirkular secara berkelanjutan
Urusan Pangan				
Pemerataan akses kecukupan pangan bergizi bagi keluarga dan penuntasan daerah rawan pangan melalui diverifikasi pangan alternatif lokal	Penguatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kecukupan gizi, energi dan protein bagi masyarakat berbasis pangan alternatif lokal	Peningkatan kapasitas masyarakat RT secara inklusif dalam pemanfaatan sumber daya lingkungan sekitar utk pemenuhan pangan bergizi dan aman	Penguatan cadangan pangan secara inklusif melalui partisipasi pertanian masyarakat yang intensif dan berkelanjutan	Penguatan sistem tata kelola pangan bergizi dan aman bagi keluarga secara mandiri dan berkelanjutan



3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra disajikan dalam tabel sbb:

Tabel 3. 3

Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	KET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	Melaksanakan Kewenangan Pemerintah Daerah Urusan Lingkungan Hidup dan Pangan	Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air	Peningkatan Konservasi lahan kritis untuk menopang sumber air dan peningkatan tutupan lahan.		
			Pengelolaan limbah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan limbah terpadu dengan pengembangan circular economy	Melaksanakan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri	
				Mengembangkan pengelolaan TPS 3R dan bank sampah untuk ekonomi sirkular masyarakat	
				Meningkatkan kondisi lingkungan agar memenuhi kriteria kota bersih dan berkelanjutan	
				Pembinaan dan pengawasan pada usaha dan kegiatan yang menghasilkan limbah.	
				Peningkatan fasilitas daur ulang sampah dan TPST serta melakukan edukasi kepada masyarakat untuk 3R	
				Meningkatkan kinerja pengelolaan sampah melalui pengembangan teknologi pemrosesan akhir	
				Optimalisasi TPA Milangasri dengan konsep <i>Landfill Mining</i> .	
				Peningkatan kerjasama dengan Swasta, Perguruan Tinggi, LSM, Media dan Asosiasi/Paguyuban dalam Pengelolaan Sampah.	
				Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanganan sampah melalui TPS3R dan Bank Sampah	
				Mengembangkan kinerja pengelolaan persampahan melalui pemenuhan sarpras persampahan	
				Pengembangan sistem ekonomi sirkular pada manajemen sampah	



NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			untuk meningkatkan ekonomi warga dan mengurangi timbulan sampah	
			Penyediaan fasilitas tempat sampah yang memadai dan sistem pengangkutan sampah yang lebih efektif di kawasan.	
			Penerapan teknologi pengelolaan sampah menjadi energi terbarukan melalui teknologi ramah lingkungan	
			Peningkatan dan Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah Spesifik.	
			Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Sampah	
			Penyusunan Dokumen Kedaruratan B3 dan Limbah B3.	
		Pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan dan kesatuan lanskap ekologis.	Penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan rekomendasi lingkungan terhadap rencana tata ruang	
		Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim	Melaksanakan penyusunan kebijakan perencanaan dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup	
			Penyusunan dokumen rencana aksi daerah pengurangan gas rumah kaca (GRK)	
		Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami	Melaksanakan penghijauan di sekitar sumber air dan daerah tangkapan air.	
			Penegakan hukum untuk perlindungan ekosistem di wilayah ekowisata	
		Penguatan Regulasi dalam pelestarian lingkungan	Melaksanakan pemantauan dan pengawasan secara rutin/berkala terhadap usaha/kegiatan/industri yang menimbulkan dampak lingkungan.	
			Penyusunan regulasi terkait	



NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			pengelolaan lingkungan hidup	
			Optimalisasi sinergi Penegakan hukum lingkungan antar sektor	
			Menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas adanya dugaan pencemaran serta pembinaan kepada pelaku usaha/kegiatan	
			Peningkatan pengendalian dan sosialisasi kesadaran untuk menindaklanjuti ketentuan dalam persetujuan lingkungan hidup dan penanganan limbah dari kegiatan/usaha.	
			Pembinaan kader/keompok pelestarian fungsi lingkungan hidup	
			Melakukan sosialisasi dan pendampingan sekolah adiwiyata dan pesantren.	
			Pelaksanaan uji emisi kendaraan	
			Peningkatan sosialisasi tentang kesadaran penghijauan dan penambahan RTH privat.	
		Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan	Penguatan ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan untuk fungsi ekologis, estetika, dan resapan air.	
			Pengembangan hutan kota dan taman resapan untuk meningkatkan kapasitas konservasi air tanah	
		Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada Catchment area, terutama pada Sub-DAS Bengawan Solo Hilir.	Penguatan ketahanan lingkungan melalui penanaman vegetasi konservasi pada daerah rawan longsor, daerah aliran sungai (DAS), sempadan sungai, embung, dan ruang terbuka hijau untuk menjaga kualitas dan kuantitas air	
		Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian dan perikanan yang terintegrasi	Menjamin ketersediaan pangan	
			peningkatan pemanfaatan pangan berbasis sumberdaya lokal dan pola konsumsi pangan masyarakat	



NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis	Sosialisasi dan pelatihan peningkatan kapasitas RT untuk keragaman pangan alternatif berbasis potensi lokal	
		Peningkatan Ketahanan pangan dan kecukupan gizi	Pembangunan Sektor pangan secara inklusif	
			Menjamin keterjangkauan pangan	
			Penanganan kerawanan pangan secara inklusif	
			Implementasi teknologi informasi untuk basis data dan informasi pangan	
			menjamin keamanan dan mutu pangan	

**BAB
4**

**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Dalam rangka pencapaian target kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan, dirumuskan tujuan dan sasaran yang disesuaikan dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan serta mengacu pada strategi pembangunan daerah Kabupaten Magetan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2025 – 2029.

Tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan yang telah ditetapkan dicapai melalui pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan oleh Perangkat Daerah. Penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan adalah bagian dari proses strategis yang menuntut keteraturan, dukungan data yang akurat, serta keselarasan dengan tujuan RPJMD dan urusan pemerintahan daerah. Rincian lengkap mengenai program, kegiatan, dan subkegiatan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4. 1
Perumusan Program, Kegiatan, Sub-Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
<p>NSPK: Melaksanakan kewenangan pemerintah daerah urusan Lingkungan Hidup dan Pangan</p> <p>Sasaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Kualitas Lingkungan yang berkelanjutan • Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Unggulan • Meningkatkan Kesejahteraan Inklusif Masyarakat 	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah	Terwujudnya Ketersediaan, akses, dan konsumsi Pangan			Indeks Ketahanan Pangan			
						Rasio Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan		
						Pravelensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Pravelence of Undernourishment)		
						Skor PPH Konsumsi		
				Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan		Persentase cakupan pemenuhan cadangan pangan di Kabupaten Magetan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	
				Tersedianya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah	Jumlah pembinaan lumbung pangan masyarakat	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah		



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia unit	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik laporan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat		Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
				Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga	Ketersediaan energy perkapita	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga	
					ketersediaan protein perkapita		
					Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Penyediaan pangan berbasis sumber daya Lokal	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/ Kota	
					Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	
					Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	
				Tercapainya Target Konsumsi Pangan Per Kapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	Konsumsi energi; kkal/kap/hr	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per Kapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	
					konsumsi protein		
					Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun	
					Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan		Persentase daerah rentan pangan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	

RENSTRA (Rencana Strategis)



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersusunnya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya dokumen FSVA	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	
					Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Penyusunan pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan	
				Tertanganinya kerawanan pangan di Kabupaten Magetan	Persentase intervensi daerah rentan dan rawan pangan	Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota	
					Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan		Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			pangan				
				Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Persentase Produk Pangan Segar Aman Diperedaran	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	
					Nilai Audit Sistem Manajemen mutu OKKPD		
					Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	
					Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Kualitas Lingkungan yang Berkelanjutan	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan daerah				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		
		Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan Pengelolaan Sampah			Indeks Kualitas Air (IKA)		
					Indeks Kualitas Udara (IKU)		
					Indeks Kualitas Lahan (IKL)		
					Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah [IKPS]		
			Meningkatnya tata kelola pengembangan perangkat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		Persentase dokumen kebijakan perencanaan dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup yang diselesaikan	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Tersedianya dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Jumlah dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota yang tersusun	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	

RENSTRA (Rencana Strategis)



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG, RPPKarst yang ditetapkan	Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH	
					jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Jumlah dokumen penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota yang tersusun	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	
					Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	Pemantauan dan Evaluasi KLHS	
					Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Persentase pemenuhan baku mutu air	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
					Persentase pemenuhan baku mutu udara		
				Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah laporan kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	
				Terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	
					Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
				Terlaksananya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Kabupaten/Kota			
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati		Persentase tutupan lahan/vegetasi	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
				Terlaksananya pengelolaan keanekaragaman hayati	Jumlah laporan pengelolaan keanekaragaman hayati Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
					Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	
					Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	
			Meningkatnya Pengelolaan terhadap Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)		Prosentase penyelesaian dokumen Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	
				Terlaksnaanya kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Dokumen Penyimpanan Sementara Limbah B3	Penyimpanan Sementara Limbah B3	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Fasilitas Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Fasilitas Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
				Terlaksananya kegiatan Pengumpulan Limbah B3	Jumlah Laporan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya Ketaatan Penanggung Jawab Usaha/dan kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUULH		Ketaatan Penanggung Jawab Usaha/dan kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	
					Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
			Terlaksananya pengelolaan kearifan lokal dan MHA terkait PPLH		Persentase pengelolaan kearifan lokal dan MHA terkait PPLH	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	
				Terlaksananya Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	
			Meningkatnya Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		Persentase pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan kegiatan pendukung kalpataru dan adiwiyata	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	
					Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					kompetensinya terkait PPLH	untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	
			Tercapainya Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		Persentase capaian penghargaan bidang lingkungan hidup	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
				Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/DuniaUsaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
			Terlaksananya penanganan pengaduan lingkungan hidup		Persentase penyelesaian pengaduan lingkungan hidup	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tertanganinya Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah penyelesaian pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	
					Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Tata Kelola Persampahan		Prosentase Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
				Terlaksananya pengelolaan sampah	Jumlah laporan pelaksanaan pengelolaan sampah dan pencapaian target retribusi persampahan/ kebersihan	Pengelolaan Sampah	
					Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengolah Sampah		
					Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Masyarakat		
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	
					Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana	

RENSTRA (Rencana Strategis)



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						dan prasarana penanganan sampah	
					Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	
		Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan			Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat		



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui birokrasi yang profesional serta pelayanan administrasi publik yang efektif dan efisien		Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran		
				Terlaksananya perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Meningkatnya Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					SKPD		
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

4.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah mengacu pada Nomenklatur

Informasi pada tabel 4.1 di atas menjadi dasar penetapan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target, dan pagu indikatif. Proses tersebut dilakukan agar setiap elemen yang dirancang selaras dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebelumnya, serta mampu menghasilkan capaian yang terukur dan mendukung prioritas pembangunan daerah. Berikut Rencana program, kegiatan, dan pagu indikatif periode Renstra 2025–2029 ditampilkan pada Tabel 4.2, dan informasi tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan.

Tabel 4. 2
Rencana Program, Kegiatan, Sub-kegiatan dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan Tahun 2025-2030

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BAS ELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET		
				2025		2026		2027		2028		2029			2030	
				TARG ET	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET		PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
	URUSAN PANGAN					Rp 455.000.000,00		Rp 1.237.000.000,00		Rp 1.545.000.000,00		Rp 1.635.000.000,00		Rp 1.815.000.000,00		
2.09. 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN Output: Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Jumlah cadangan pangan di Kabupaten Magetan ton Persentase cakupan pemuhan kebutuhan pangan di Kabupaten Magetan %	239	239												
			4434		110	Rp 25.000.000,00	110	Rp 125.000.000,00	110	Rp 175.000.000,00	110	Rp 175.000.000,00	110	Rp 125.000.000,00		
2.09. 02.2. 01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Output: Tersedianya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah	Persentase partisipasi OPD pemangku Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten % Jumlah pembinaan lumbung pangan masyarakat unit		100												
					54	Rp 25.000.000,00	55	Rp 125.000.000,00	56	Rp 175.000.000,00	57	Rp 175.000.000,00	58	Rp 125.000.000,00		
2.09. 02.2. 01.0 003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Output: Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia unit	1	1	1	Rp 25.000.000,00	1	Rp 100.000.000,00	1	Rp 150.000.000,00	2	Rp 150.000.000,00	2	Rp 100.000.000,00		
2.09. 02.2. 01.0 004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik Output: Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik laporan	3,00	3,00	-	Rp -	12,0 0	Rp 25.000.000,00	12,00	Rp 25.000.000,00	12,0 0	Rp 25.000.000,00	12,00	Rp 25.000.000,00		



KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BAS ELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Outcome: Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan angka	93,6	93,65	93,68	Rp 190.000.000,00	93,70	Rp 467.000.000,00	93,95	Rp 505.000.000,00	94,10	Rp 535.000.000,00	94,35	Rp 585.000.000,00	
2.09.03.2.01	Penyaluran dan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Output: Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga	Ketersediaan energy dan kkal/kap/hr	6043	6308											
		ketersediaan protein gr/kap/hr	138	151,05											
		Ketersediaan energy perkapita %		100	100	Rp 105.000.000,00	100	Rp 197.000.000,00	100	Rp 205.000.000,00	100	Rp 210.000.000,00	100	Rp 210.000.000,00	
		ketersediaan protein perkapita %		100	100		100		100		100		100		
2.09.03.2.01.002	Penyediaan pangan berbasis sumber daya Lokal Output: Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia laporan	1	1	1	Rp 40.000.000,00	1	Rp 100.000.000,00	1	Rp 100.000.000,00	1	Rp 100.000.000,00	1	Rp 100.000.000,00	
2.09.03.2.01.010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/ Kota Output: Berkembangnya Kelembagaan Distribusi Pangan kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan unit	50	50	53	Rp 20.000.000,00	55	Rp 50.000.000,00	56	Rp 50.000.000,00	57	Rp 50.000.000,00	58	Rp 50.000.000,00	
2.09.03.2.01.012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota Output: Tersedianya informasi harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota Laporan	365	365	365	Rp 30.000.000,00	365	Rp 32.000.000,00	365	Rp 35.000.000,00	365	Rp 35.000.000,00	365	Rp 35.000.000,00	



KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BAS ELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.09. 03.2. 01.0 016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Output: Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) dokumen	13	13	30	Rp 15.000.000,00	30	Rp 15.000.000,00	30	Rp 20.000.000,00	30	Rp 25.000.000,00	30	Rp 25.000.000,00	
2.09. 03.2. 04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per Kapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi Output: Tercapainya Target Konsumsi Pangan Per Kapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	Konsumsi energi; kkal/kap/hr	1.99 2,80	1.870 ,00	1875	Rp 85.000.000,00	1900	Rp 270.000.000,00	1950	Rp 300.000.000,00	1975	Rp 325.000.000,00	2000	Rp 375.000.000,00	
		konsumsi protein gr/kap/hr	65,3	57,5	57,5		57,5		57,5		57,5		57,5		
2.09. 03.2. 04.0 001	Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun Output: Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun dokumen	1	1	1	Rp 15.000.000,00	1	Rp 20.000.000,00	1	Rp 20.000.000,00	1	Rp 25.000.000,00	1	Rp 25.000.000,00	
2.09. 03.2. 04.0 002	Pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal Output: Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal laporan	1	1	1	Rp 70.000.000,00	1	Rp 250.000.000,00	1	Rp 280.000.000,00	1	Rp 300.000.000,00	1	Rp 350.000.000,00	
2.09. 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Outcome: Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Penanganan daerah rawan pangan %	100	100											
		Persentase daerah rentan rawan pangan %	0	0	0	Rp 200.000.000,00	0	Rp 575.000.000,00	0	Rp 725.000.000,00	0	Rp 825.000.000,00	0	Rp 1.025.000.000,00	



KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BAS ELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.09. 04.2. 01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Output: Tersusunnya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya dokumen FSVA dokumen	1	1	1	Rp 15.000.000,00	1	Rp 25.000.000,00	1	Rp 25.000.000,00	1	Rp 25.000.000,00	1	Rp 25.000.000,00	
2.09. 04.2. 01.0 001	Penyusunan pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan Output: Tersusunnya pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan dokumen	13	13	13	Rp 15.000.000,00	30	Rp 25.000.000,00	30	Rp 25.000.000,00	30	Rp 25.000.000,00	30	Rp 25.000.000,00	
2.09. 04.2. 02	Penanganan kerawanan pangan kewenangan Kabupaten/Kota Output: Tertanganinya kerawanan pangan di Kabupaten Magetan	Persentase intervensi daerah rentan dan rawan pangan %	100	100	100	Rp 185.000.000,00	100	Rp 550.000.000,00	100	Rp 700.000.000,00	100	Rp 800.000.000,00	100	Rp 1.000.000.000,00	
2.09. 04.2. 02.0 002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Output: Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dokumen	12	12	12	Rp 145.000.000,00	12	Rp 500.000.000,00	12	Rp 650.000.000,00	12	Rp 750.000.000,00	12	Rp 950.000.000,00	
2.09. 04.2. 02.0 003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota Output: Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota laporan	12	12	12	Rp 40.000.000,00	12	Rp 50.000.000,00	12	Rp 50.000.000,00	12	Rp 50.000.000,00	12	Rp 50.000.000,00	



KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BAS ELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030			
				TARG ET	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
2.09. 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Outcome: Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Cakupan waktu pelaksanaan pengawasan keamanan pangan %		100												
		Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan %			100	Rp 40.000.000,00	100	Rp 70.000.000,00	100	Rp 140.000.000,00	100	Rp 100.000.000,00	100	Rp 80.000.000,00		
2.09. 05.2. 01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Output: Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota bulan		12												
		Persentase Produk Pangan Segar Aman Diperedaran % dan	96		96	Rp 40.000.000,00	96	Rp 70.000.000,00	96	Rp 140.000.000,00	96	Rp 100.000.000,00	96	Rp 80.000.000,00		
		Nilai Audit Sistem Manajemen mutu OKKPD Skor	78		80		83		84		86		88			
2.09. 05.2. 01.0 004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Output: Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota dokumen	7	7	7	Rp 20.000.000,00	8	Rp 20.000.000,00	8	Rp 20.000.000,00	8	Rp 20.000.000,00	8	Rp 25.000.000,00		
2.09. 05.2. 01.0 008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Output: Terlaksananya koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan laporan	12	12	12	Rp 20.000.000,00	12	Rp 25.000.000,00	12	Rp 20.000.000,00	12	Rp 30.000.000,00	12	Rp 30.000.000,00		



KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BAS ELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.09. 05.2. 01.0 009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Output: Tersedianya dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan dokumen	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan dokumen	1	-	-	Rp -	1	Rp 25.000.000,00	1	Rp 100.000.000,00	1	Rp 50.000.000,00	1	Rp 25.000.000,00	
2.11	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP					Rp 19.930.247.284,00		Rp 43.011.217.872,00		Rp 42.879.599.872,00		Rp 44.083.888.872,00		Rp 45.235.303.672,00	
2.11. 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Outcome : Meningkatnya tata kelola pengembangan perangkat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase dokumen kebijakan perencanaan dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup yang diselesaikan %	100	100	100	Rp 165.400.000,00	100	Rp 570.000.000,00	100	Rp 366.500.000,00	100	Rp 467.000.000,00	100	Rp 518.000.000,00	
2.11. 02.2. 01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Output: Tersedianya dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Jumlah dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota yang tersusun dokumen	1	1	2	Rp 160.400.000,00	3	Rp 365.000.000,00	2	Rp 161.500.000,00	1	Rp 62.000.000,00	2	Rp 313.000.000,00	
2.11. 02.2. 01.0 002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota Output: Tersedianya Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota dokumen	1	1	2	Rp 160.400.000,00	2	Rp 165.000.000,00	1	Rp 61.500.000,00	1	Rp 62.000.000,00	1	Rp 63.000.000,00	
2.11. 02.2. 01.0 003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota Output: RPPLH kabupaten/kota yang ditetapkan	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan dokumen	0	-	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 100.000.000,00	0	Rp -	0	Rp -	



KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BAS ELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025	2026		2027		2028		2029		2030			
				TARG ET	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
2.11. 02.2. 01.0 005	Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH Output: Tersedianya dokumen rencana tematik yang merupakan bagian arahan RPPLH	Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG, RPPKarst yang ditetapkan II dokumen	0	-	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 250.000.000,00		
2.11. 02.2. 01.0 006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota Output: RPPLH kabupaten/kota yang disusun	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi dokumen	0	-	0	Rp -	1	Rp 200.000.000,00								
2.11. 02.2. 02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Output: Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Jumlah dokumen penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota yang tersusun dokumen	3	1	1	Rp 5.000.000,00	2	Rp 205.000.000,00	2	Rp 205.000.000,00	3	Rp 405.000.000,00	2	Rp 205.000.000,00		
2.11. 02.2. 02.0 002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Output: Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun dokumen	1	1	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 200.000.000,00	0	Rp -		
2.11. 02.2. 02.0 004	Pemantauan dan Evaluasi KLHS Output: Terlaksananya pemantauan dan evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi II dokumen	-	-	1	Rp 5.000.000,00	1	Rp 5.000.000,00	1	Rp 5.000.000,00	1	Rp 5.000.000,00	1	Rp 5.000.000,00		
2.11. 02.2. 02.0 005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang Output: Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun dokumen	2	-	-	Rp -	1	Rp 200.000.000,00	1	Rp 200.000.000,00	1	Rp 200.000.000,00	1	Rp 200.000.000,00		



KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BAS ELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.11. 02.2. 02.0 006	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup Output: Tersusunnya KLHS untuk KRP Lainnya yang berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun dokumen	-	-	-	Rp -									
2.11. 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Outcome: Meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pemenuhan baku mutu air % Persentase pemenuhan baku mutu udara %	100	100	100	Rp 326.420.000,00	100	Rp 345.700.000,00	100	Rp 346.000.000,00	100	Rp 346.000.000,00	100	Rp 346.000.000,00	
2.11. 03.2. 01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Output: Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah laporan kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota yang dilaksanakan laporan	2	2	2	Rp 55.000.000,00	2	Rp 57.700.000,00	2	Rp 58.000.000,00	2	Rp 58.000.000,00	2	Rp 58.000.000,00	
2.11. 03.2. 01.0 001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Output: Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut dokumen	1	1	1	Rp 20.000.000,00	1	Rp 20.000.000,00	1	Rp 20.000.000,00	1	Rp 20.000.000,00	1	Rp 20.000.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BAS ELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Output: Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan dokumen	1	1	1	Rp 35.000.000,00	1	Rp 37.700.000,00	1	Rp 38.000.000,00	1	Rp 38.000.000,00	1	Rp 38.000.000,00	
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Output: Terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota yang dilaksanakan laporan	2	2	2	Rp 71.420.000,00	2	Rp 88.000.000,00	2	Rp 88.000.000,00	2	Rp 88.000.000,00	2	Rp 88.000.000,00	
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Output: Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan laporan	1	1	1	Rp 25.000.000,00	1	Rp 28.000.000,00	1	Rp 28.000.000,00	1	Rp 28.000.000,00	1	Rp 28.000.000,00	
2.11.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Output: Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan titik	1	1	1	Rp 46.420.000,00	1	Rp 60.000.000,00	1	Rp 60.000.000,00	1	Rp 60.000.000,00	1	Rp 60.000.000,00	



KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BAS ELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.11. 03.2. 03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Output: Terlaksananya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dokumen	3	2	3	Rp 200.000.000,00	3	Rp 200.000.000,00	3	Rp 200.000.000,00	3	Rp 200.000.000,00	3	Rp 200.000.000,00	
2.11. 03.2. 03.0 001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Output: Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan dokumen	3	2	3	Rp 200.000.000,00	3	Rp 200.000.000,00	3	Rp 200.000.000,00	3	Rp 200.000.000,00	3	Rp 200.000.000,00	
2.11. 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Outcome: Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI) dengan kondisi baik %	100	100											
		Persentase tutupan lahan/vegetasi %	64,5		64,5	Rp 936.000.000,00	64,5	Rp 2.784.480.000,00	64,5	Rp 1.909.170.000,00	64,5	Rp 1.946.365.000,00	64,53	Rp 1.984.279.800,00	
2.11. 04.2. 01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Output: Terlaksananya pengelolaan keanekaragaman hayati	Jumlah laporan pengelolaan keanekaragaman hayati Kabupaten/Kota yang dilaksanakan laporan	5	5	3	Rp 936.000.000,00	5	Rp 2.784.480.000,00	5	Rp 1.909.170.000,00	5	Rp 1.946.365.000,00	5	Rp 1.984.279.800,00	



KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BAS ELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
2.11. 04.2. 01.0 001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Output: Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun dokumen	1	1	0	Rp -	1	Rp 250.000.000,00	1	Rp 255.000.000,00	1	Rp 260.100.000,00	1	Rp 265.302.000,00		
2.11. 04.2. 01.0 004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Output: Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota Ha	41,7	41,7	41,7	Rp 220.000.000,00	41,7	Rp 1.500.000.000,00	41,7	Rp 600.000.000,00	41,7	Rp 612.000.000,00	41,7	Rp 624.240.000,00		
2.11. 04.2. 01.0 006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Output: Meningkatnya Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Orang	-	-	0	Rp -	50	Rp 50.000.000,00	50	Rp 50.000.000,00	50	Rp 50.000.000,00	50	Rp 50.000.000,00		
2.11. 04.2. 01.0 007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati Output: Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola Unit	54	54	45	Rp 616.000.000,00	45	Rp 634.480.000,00	45	Rp 647.170.000,00	45	Rp 660.115.000,00	45	Rp 673.315.000,00		
2.11. 04.2. 01.0 009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan Output: Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota Unit	4	4	2	Rp 100.000.000,00	4	Rp 350.000.000,00	4	Rp 357.000.000,00	4	Rp 364.150.000,00	4	Rp 371.422.800,00		
2.11. 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Outcome:	Prosentase dokumen Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun	100													



KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BAS ELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET		
				2025	2026		2027		2028		2029		2030			
				TARG ET	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET		PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
	Meningkatnya Pengelolaan terhadap Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	(Limbah B3) yang diselesaikan %														
		Prosentase penyelesaian dokumen Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) %	100		100	Rp 40.000.000,00	100	Rp 40.800.000,00	100	Rp 42.100.000,00	100	Rp 43.700.000,00	100	Rp 45.000.000,00		
2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3 Output: Terlaksnaanya kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Dokumen Penyimpanan Sementara Limbah B3 dokumen	2	2	1	Rp 30.000.000,00	1	Rp 30.500.000,00	1	Rp 31.500.000,00	1	Rp 32.400.000,00	1	Rp 33.500.000,00		
2.11.05.2.01.001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Output: Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dokumen	1	1												



KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BAS ELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.11. 05.2. 01.0 002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 Output: Terlaksananya Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 laporan	1	1											
2.11. 05.2. 01.0 005	Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk diintegrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) Output: Terfasilitasinya Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk diintegrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk diintegrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) dokumen	1	-	1	Rp 30.000.000,00	1	Rp 30.500.000,00	1	Rp 31.500.000,00	1	Rp 32.400.000,00	1	Rp 33.500.000,00	
2.11. 05.2. 02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Output: Terlaksananya kegiatan Pengumpulan Limbah B3	Jumlah Laporan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota laporan	1		1	Rp 10.000.000,00	1	Rp 10.300.000,00	1	Rp 10.600.000,00	1	Rp 11.300.000,00	1	Rp 11.500.000,00	



KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BAS ELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030			
				TARG ET	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Output: Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Pengelolaan Limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya dokumen	1	1	1	Rp 10.000.000,00	1	Rp 10.300.000,00	1	Rp 10.600.000,00	1	Rp 11.300.000,00	1	Rp 11.500.000,00		
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Outcome: Meningkatnya Ketaatan Penanggung Jawab Usaha/ dan kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUULH	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) %	100	100												
		Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha/ dan kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah II %	100		100	Rp 50.950.000,00	100	Rp 52.000.000,00	100	Rp 54.000.000,00	100	Rp 56.000.000,00	100	Rp 58.000.000,00		



KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BAS ELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.11. 06.2. 01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Output: Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan laporan	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap adap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan laporan	2	2	2	Rp 50.950.000,00	2	Rp 52.000.000,00	2	Rp 54.000.000,00	2	Rp 56.000.000,00	2	Rp 58.000.000,00	
2.11. 06.2. 01.0 001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Output: Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan dokumen	1	1	1	Rp 12.200.000,00	1	Rp 13.000.000,00	1	Rp 14.000.000,00	1	Rp 15.000.000,00	1	Rp 16.000.000,00	
2.11. 06.2. 01.0 009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Output: Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi Badan Usaha	15	15	15	Rp 38.750.000,00	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	



KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BAS ELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.11. 06.2. 01.0 010	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Output: Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi Usaha/Kegiatan	15	15	-	Rp -	17	Rp 39.000.000,00	19	Rp 40.000.000,00	21	Rp 41.000.000,00	23	Rp 42.000.000,00	
2.11. 07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH Outcome: Terlaksananya pengelolaan kearifan lokal dan MHA terkait PPLH	Persentase pengelolaan kearifan lokal dan MHA terkait PPLH %	100	100	100	Rp 15.000.000,00	100	Rp -	100	Rp -	100	Rp -	100	Rp -	
2.11. 07.2. 01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH Output: Terlaksananya Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH lokasi	1	1	1	Rp 15.000.000,00	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	



KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BAS ELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
				2025	2026		2027		2028		2029		2030			
				TARG ET	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
2.11. 07.2. 02.0 001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH Output: Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH dokumen	1	1	1	Rp 15.000.000,00	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -		
2.11. 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Outcome: Meningkatnya Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat %	100	100	100	Rp 162.600.000,00	100	Rp 181.000.000,00	100	Rp 185.000.000,00	100	Rp 189.000.000,00	100	Rp 193.000.000,00		
2.11. 08.2. 01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Output: Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan kegiatan pendukung kalpataru dan adiwiyata laporan	9	9	10	Rp 162.600.000,00	9	Rp 181.000.000,00	9	Rp 185.000.000,00	9	Rp 189.000.000,00	9	Rp 193.000.000,00		



KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BAS ELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.11. 08.2. 01.0 002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Output: Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan dokumen	8	8	8	Rp 104.600.000,00	8	Rp 106.000.000,00	8	Rp 108.000.000,00	8	Rp 110.000.000,00	8	Rp 112.000.000,00	
2.11. 08.2. 01.0 005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/komunitas/keompok masyarakat Output: Meningkatnya jumlah Lembaga pendidikan formal/Lembaga masyarakat/komunitas/keompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/kota yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya	Jumlah lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/komunitas/keompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH lembaga	1	1	2	Rp 58.000.000,00	2	Rp 75.000.000,00	2	Rp 77.000.000,00	2	Rp 79.000.000,00	2	Rp 81.000.000,00	
2.11. 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Outcome: Tercapainya Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase capaian penghargaan bidang lingkungan hidup %	100	100	100	Rp 100.000.000,00	100	Rp 102.000.000,00	100	Rp 104.000.000,00	100	Rp 106.000.000,00	100	Rp 108.000.000,00	
2.11. 09.2. 01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Output: Terlaksananya pemberian penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/DuniaUsaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kegiatan	1	1	1	Rp 100.000.000,00	1	Rp 102.000.000,00	1	Rp 104.000.000,00	1	Rp 106.000.000,00	1	Rp 108.000.000,00	



KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BAS ELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.11.09.201.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Output: Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH Entitas	1	1	1	Rp 100.000.000,00	1	Rp 102.000.000,00	1	Rp 104.000.000,00	1	Rp 106.000.000,00	1	Rp 108.000.000,00	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Output: Terlaksananya penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persentase penyelesaian pengaduan lingkungan hidup %	100	100	100	Rp 23.000.000,00	100	Rp 24.000.000,00	100	Rp 25.000.000,00	100	Rp 26.000.000,00	100	Rp 27.000.000,00	
2.11.10.201	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota Output: Tertanganinya Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan penyelesaian pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota laporan	1	1	1	Rp 23.000.000,00	1	Rp 24.000.000,00	1	Rp 25.000.000,00	1	Rp 26.000.000,00	1	Rp 27.000.000,00	
2.11.10.201.009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota Output: Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/di kelola pengaduan	6	8	8	Rp 23.000.000,00	8	Rp 24.000.000,00	8	Rp 25.000.000,00	8	Rp 26.000.000,00	8	Rp 27.000.000,00	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah yang terkelola %	99.93	100											

RENSTRA (Rencana Strategis)

Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kab. Magetan
Tahun 2025-2029

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BAS ELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Outcome: Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Prosentase Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah II %	74,7	81,3 9	84,5 1	Rp 2.210.000.000,00	87,6 3	Rp 22.061.547.000,00	90,75	Rp 22.918.139.000,00	93,8 7	Rp 23.974.133.000,00	96,99	Rp 25.026.333.000,00	
2.11. 11.2. 01	Pengelolaan Sampah Output: Terlaksananya pengelolaan sampah	Jumlah laporan pelaksanaan pengelolaan sampah dan pencapaian target retribusi persampahan/ kebersihan Laporan	12	12	12	Rp 2.195.000.000,00	12	Rp 22.046.547.000,00	12	Rp 22.902.139.000,00	12	Rp 23.957.733.000,00	12	Rp 25.009.333.000,00	
		Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengolah Sampah II %	30,0 2	43,67	43,8 7		44,0 7		44,27		44,4 7		44,67		
2.11. 11.2. 01.0 004	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Output: Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Kelompok	420	430	440	Rp 163.201.800,00	450	Rp 168.097.000,00	460	Rp 173.139.000,00	470	Rp 178.333.000,00	480	Rp 178.333.000,00	
2.11. 11.2. 01.0 005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Output: Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada	1	1	1	Rp 30.000.000,00	1	Rp 31.000.000,00	1	Rp 32.000.000,00	1	Rp 33.000.000,00	1	Rp 34.000.000,00	



KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BAS ELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030			
				TARG ET	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
		Jakstrada dokumen														
2.11. 11.2. 01.0 007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Output: Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir unit	1	1	1	Rp 50.000.000,00	1	Rp 20.000.000.000,00	1	Rp 21.000.000.000,00	1	Rp 22.000.000.000,00	1	Rp 23.000.000.000,00		
2.11. 11.2. 01.0 008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota Output: Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan dokumen	0	1	2	Rp 400.000.000,00	5	Rp 250.000.000,00	1	Rp 50.000.000,00	1	Rp 50.000.000,00	1	Rp 50.000.000,00		
2.11. 11.2. 01.0 015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah Output: Sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik Unit	40	41	41	Rp 1.536.798.200,00	41	Rp 1.582.000.000,00	41	Rp 1.631.000.000,00	41	Rp 1.680.000.000,00	41	Rp 1.730.000.000,00		
2.11. 11.2. 01.0 018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah Output: Kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah yang dilaksanakan	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah laporan	12	12	12	Rp 15.000.000,00	12	Rp 15.450.000,00	12	Rp 16.000.000,00	12	Rp 16.400.000,00	12	Rp 17.000.000,00		



KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BAS ELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.11. 11.2. 03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta Output: Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta Dokumen	1	1	1	Rp 15.000.000,00	1	Rp 15.000.000,00	1	Rp 16.000.000,00	1	Rp 16.400.000,00	1	Rp 17.000.000,00	
2.11. 11.2. 03.0 003	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Output: Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota laporan	1	1	1	Rp 15.000.000,00	1	Rp 15.000.000,00	1	Rp 16.000.000,00	1	Rp 16.400.000,00	1	Rp 17.000.000,00	
2.11. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Outcome: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Birokrasi yang Profesional Serta Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Efisien pada Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Lingkungan Hidup	Kepuasan ASN Dinas Lingkungan Hidup terhadap Layanan Kesekretariatan Dinas Lingkungan Hidup Angka Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan Skor Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran %	79,4 2	82,7											
					79,4 3	Rp 15.900.877.284,00	79,4 4	Rp 16.849.690.872,00	79,45	Rp 16.929.690.872,00	79,4 6	Rp 16.929.690.872,00	79,47	Rp 16.929.690.872,00	
					98,1 0		98,1 3		98,15		98,1 8		98,20		

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BAS ELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
2.11. 01.2. 01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Output: Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu Dokumen	18	18	18	Rp 30.000.000,00	18	Rp 30.000.000,00	18	Rp 30.000.000,00	18	Rp 30.000.000,00	18	Rp 30.000.000,00		
2.11. 01.2. 01.0 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Output: Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dokumen	11	11	11	Rp 20.000.000,00	11	Rp 20.000.000,00	11	Rp 20.000.000,00	11	Rp 20.000.000,00	11	Rp 20.000.000,00		
2.11. 01.2. 01.0 007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Output: Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan	7	7	7	Rp 10.000.000,00	7	Rp 10.000.000,00	7	Rp 10.000.000,00	7	Rp 10.000.000,00	7	Rp 10.000.000,00		
2.11. 01.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Output: Terlaksananya Kegiatan yang Sesuai dengan Perencanaan Anggaran Perangkat Daerah dan Administrasi Keuangan sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah %	96,1	94	96,2 0	Rp 7.220.156.342,00	96,2 5	Rp 7.478.690.872,00	96,30	Rp 7.478.690.872,00	96,3 5	Rp 7.478.690.872,00	96,40	Rp 7.478.690.872,00		
2.11. 01.2. 02.0 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Output: Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang / bulan	994	952	966	Rp 7.211.156.342,00	994	Rp 7.468.690.872,00	994	Rp 7.468.690.872,00	994	Rp 7.468.690.872,00	994	Rp 7.468.690.872,00		
2.11. 01.2. 02.0 007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Output: Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD laporan	5	5	5	Rp 9.000.000,00	5	Rp 10.000.000,00	5	Rp 10.000.000,00	5	Rp 10.000.000,00	5	Rp 10.000.000,00		



KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BAS ELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	TAR GET	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
2.11. 01.2. 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Output: Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Paket	-	-	-	Rp -	1	Rp 5.000.000,00	1	Rp 5.000.000,00	1	Rp 5.000.000,00	1	Rp 5.000.000,00		
2.11. 01.2. 03.0 006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Output: Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD laporan	-	-	-	Rp -	1	Rp 5.000.000,00	1	Rp 5.000.000,00	1	Rp 5.000.000,00	1	Rp 5.000.000,00		
2.11. 01.2. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Output: Meningkatnya Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur Orang	85	85	69	Rp 15.000.000,00	71	Rp 40.500.000,00	71	Rp 40.500.000,00	71	Rp 40.500.000,00	71	Rp 40.500.000,00		
2.11. 01.2. 05.0 010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Output: Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan orang	85	-	69	Rp 15.000.000,00	71	Rp 15.500.000,00	71	Rp 15.500.000,00	71	Rp 15.500.000,00	71	Rp 15.500.000,00		
2.11. 01.2. 05.0 011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Output: Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan orang	15	5	0	Rp -	10	Rp 25.000.000,00	10	Rp 25.000.000,00	10	Rp 25.000.000,00	10	Rp 25.000.000,00		
2.11. 01.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah Output: Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Paket	7	7	6	Rp 288.500.000,00	7	Rp 380.500.000,00	7	Rp 460.500.000,00	7	Rp 460.500.000,00	7	Rp 460.500.000,00		



KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BAS ELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.11. 01.2. 06.0 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Output: Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket	1	1	1	Rp 15.000.000,00	1	Rp 15.000.000,00	1	Rp 15.000.000,00	1	Rp 15.000.000,00	1	Rp 15.000.000,00	
2.11. 01.2. 06.0 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Output: Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket	1	1	1	Rp 60.000.000,00	1	Rp 120.000.000,00	1	Rp 150.000.000,00	1	Rp 150.000.000,00	1	Rp 150.000.000,00	
2.11. 01.2. 06.0 003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Output: Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket	1	1	1	Rp 11.500.000,00	1	Rp 12.000.000,00	1	Rp 12.000.000,00	1	Rp 12.000.000,00	1	Rp 12.000.000,00	
2.11. 01.2. 06.0 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Output: Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket	1	1	1	Rp 30.000.000,00	1	Rp 31.000.000,00	1	Rp 31.000.000,00	1	Rp 31.000.000,00	1	Rp 31.000.000,00	
2.11. 01.2. 06.0 005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Output: Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Paket	1	1	1	Rp 45.000.000,00	1	Rp 46.500.000,00	1	Rp 46.500.000,00	1	Rp 46.500.000,00	1	Rp 46.500.000,00	
2.11. 01.2. 06.0 006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Output: Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan Dokumen	1	1	0	Rp -	1	Rp 6.000.000,00	1	Rp 6.000.000,00	1	Rp 6.000.000,00	1	Rp 6.000.000,00	
2.11. 01.2. 06.0 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Output: Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD laporan	1	1	1	Rp 127.000.000,00	1	Rp 150.000.000,00	1	Rp 200.000.000,00	1	Rp 200.000.000,00	1	Rp 200.000.000,00	



KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BAS ELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.11. 01.2. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Output: Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Unit	0	-	-	Rp -	1	Rp 380.000.000,00	1	Rp 380.000.000,00	1	Rp 380.000.000,00	1	Rp 380.000.000,00	
2.11. 01.2. 07.0 001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Output: Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan unit	0	-	-	Rp -	1	Rp 30.000.000,00	1	Rp 30.000.000,00	1	Rp 30.000.000,00	1	Rp 30.000.000,00	
2.11. 01.2. 07.0 002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Output: Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan unit	0	-	-	Rp -	1	Rp 350.000.000,00	1	Rp 350.000.000,00	1	Rp 350.000.000,00	1	Rp 350.000.000,00	
2.11. 01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Output: Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah laporan	3	3	3	Rp 8.067.220.942,00	3	Rp 8.205.000.000,00	3	Rp 8.205.000.000,00	3	Rp 8.205.000.000,00	3	Rp 8.205.000.000,00	
2.11. 01.2. 08.0 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Output: Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan laporan	1	1	1	Rp 180.000.000,00	1	Rp 180.000.000,00	1	Rp 180.000.000,00	1	Rp 180.000.000,00	1	Rp 180.000.000,00	
2.11. 01.2. 08.0 003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Output: Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan laporan	1	1	1	Rp 30.000.000,00	1	Rp 30.000.000,00	1	Rp 30.000.000,00	1	Rp 30.000.000,00	1	Rp 30.000.000,00	



KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BAS ELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.11. 01.2. 08.0 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Output: Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan laporan	12	12	12	Rp 7.857.220.942,00	12	Rp 7.995.000.000,00	12	Rp 7.995.000.000,00	12	Rp 7.995.000.000,00	12	Rp 7.995.000.000,00	
2.11. 01.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Output: Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah unit	43	43	43	Rp 280.000.000,00	43	Rp 330.000.000,00	43	Rp 330.000.000,00	43	Rp 330.000.000,00	43	Rp 330.000.000,00	
2.11. 01.2. 09.0 002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Output: Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya unit	42	42	42	Rp 230.000.000,00	42	Rp 230.000.000,00	42	Rp 230.000.000,00	42	Rp 230.000.000,00	42	Rp 230.000.000,00	
2.11. 01.2. 09.0 009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Output: Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi unit	1	1	1	Rp 50.000.000,00	1	Rp 100.000.000,00	1	Rp 100.000.000,00	1	Rp 100.000.000,00	1	Rp 100.000.000,00	
		TOTAL				Rp 20.385.247.284,00		Rp 44.248.217.872,00		Rp44.424.599.872,00		Rp45.718.888.872,00		Rp47.050.303.672,00	

4.3. Sub-Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Magetan tahun 2025-2029, Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan mempunyai peran untuk mensukseskan Misi ke 2, Misi ke 4 dan Misi ke 7 dengan Tujuan ke-2 RPJMD yaitu “Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan” pada sasaran “Meningkatnya Kualitas Lingkungan yang Berkelanjutan”, dan Sasaran “Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Unggulan”, dan Tujuan ke 4 RPJMD yaitu “Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat” pada sasaran “Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat” selanjutnya di turunkan ke tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan. Untuk memfokuskan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan dilakukan dengan menetapkan sub-kegiatan yang diarahkan pada pencapaian sasaran, tujuan, dan program prioritas pembangunan daerah.

Tabel 4. 3
Daftar Sub-kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Mendukung Sasaran RPJMD "Meningkatnya Kualitas Lingkungan yang Berkelanjutan"
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	
			Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	
			Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	
2.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Mendukung Sasaran RPJMD "Meningkatnya Kualitas Lingkungan yang Berkelanjutan"
			Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
			Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	
3.	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Meningkatnya pengelolaan Limbah B3	Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk diintegrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Mendukung Sasaran RPJMD "Meningkatnya Kualitas Lingkungan yang Berkelanjutan"
4.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Meningkatnya ketaatan kegiatan/usaha dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau IzinPPLH Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Mendukung Sasaran RPJMD "Meningkatnya Kualitas Lingkungan yang Berkelanjutan"
5.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Mendukung Sasaran RPJMD "Meningkatnya Kualitas Lingkungan yang Berkelanjutan"
6.	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya ketaatan kegiatan/usaha dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Mendukung Sasaran RPJMD "Meningkatnya Kualitas Lingkungan yang Berkelanjutan"
7.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan	Mendukung Sasaran RPJMD "Meningkatnya Pemerataan



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Prasarana Pengelolaan Persampahan	dan Kualitas Infrastruktur Daerah”
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	
			Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	
			Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	
			Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	
8.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Penyediaan pangan berbasis sumber daya Lokal	Mendukung Sasaran RPJMD “Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Unggulan” dan “Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat”
			Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/ Kota	
			Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	
			Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun	
			Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	
9.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Penyusunan pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan	Mendukung Sasaran RPJMD “Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Unggulan” dan “Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat”
			Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Mendukung Sasaran RPJMD “Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Unggulan” dan “Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat”

4.4. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan ditetapkan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator tersebut menjadi acuan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan selama periode 2025–2030.

Tabel 4. 4
Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	69,88	69,98	70,08	70,18	70,28	70,38	IKU
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	80,88	80,98	81,08	81,18	81,28	81,38	IKU
3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	53,33	53,33	53,33	53,33	53,33	53,33	IKU
4	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah [IKPS]	Indeks	72,420	72,430	72,440	72,445	72,450	72,460	IKU
5	Rasio Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan	%	110	110	110	110	110	110	IKU
6	Pravelensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Pravelence of Undernourishment)	Skor	1,83	1,78	1,73	1,68	1,63	1,58	IKU
7	Skor PPH Konsumsi	Skor	93,90	94,30	94,60	94,90	95,40	95,80	IKU
8	Nilai SAKIP	Nilai	93,36	93,37	93,38	93,39	93,40	93,41	IKU
9	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	83,03	83,04	83,05	83,06	83,07	83,08	IKU

Definisi operasional/rumus untuk IKU Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. 5
Definisi Operasional/ Rumus IKU Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan



NO.	INDIKATOR	FORMULASI PENGHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB																														
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	$IKA \text{ Kab./Kota} = \frac{\sum_i^n IKA \text{ Titik Pantau}_i}{\text{Jumlah Titik Pantau}}$ <p>Keterangan : Nilai IKA dihitung dari 8 parameter yaitu padatan tersuspensi total (TSS), oksigen terlarut (DO), derajat keasaman (pH), kebutuhan oksigen biologi (BOD), kebutuhan oksigen kimiawi (COD), Nitrat (NO₃-N), total fosfat (T-P) dan fecal coliform (Fecal Coli)</p> $IKA \text{ Titik Pantau} = \sum_i^n w_i I_i$ <p>W = Faktor Pembobot I = Sub- Indeks</p> <p>Faktor Pembobot masing-masing Parameter untuk perhitungan IKA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Parameter</th> <th>Faktor Pembobot (w)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>pH</td> <td>0,137</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>BOD</td> <td>0,133</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>COD</td> <td>0,140</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>TSS</td> <td>0,086</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>DO</td> <td>0,167</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>NO₃-N</td> <td>0,081</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>T-P</td> <td>0,100</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Fecal Coli</td> <td>0,157</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total</td> <td>1,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Status Dan Kondisi Lingkungan Hidup Serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup</p>	No.	Parameter	Faktor Pembobot (w)	1.	pH	0,137	2.	BOD	0,133	3.	COD	0,140	4.	TSS	0,086	5.	DO	0,167	6.	NO ₃ -N	0,081	7.	T-P	0,100	8.	Fecal Coli	0,157	Total		1,000	Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan pengendalian Lingkungan Hidup	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan
No.	Parameter	Faktor Pembobot (w)																																
1.	pH	0,137																																
2.	BOD	0,133																																
3.	COD	0,140																																
4.	TSS	0,086																																
5.	DO	0,167																																
6.	NO ₃ -N	0,081																																
7.	T-P	0,100																																
8.	Fecal Coli	0,157																																
Total		1,000																																
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,99} (I_{INA} - 0,01) \right)$ $I_{INA} = \text{Rata - rata Indeks NO}_2 + \text{Indeks SO}_2 + \text{Indeks PM}_{2,5}$ $\text{Indeks NO}_2 = \frac{\text{Rata - rata NO}_2}{\text{Baku Mutu INA}}$ $\text{Indeks SO}_2 = \frac{\text{Rata - rata SO}_2}{\text{Baku Mutu INA}}$ $\text{Indeks PM}_{2,5} = \frac{\text{Rata - rata PM}_{2,5}}{\text{Baku Mutu INA}}$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • NO₂ mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin • SO₂ mewakili emisi dari industry dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya • Particulate Matter 2,5 (PM_{2,5}) mewakili emisi kebakaran hutan dan lahan, transportasi, debu jalanan dan konstruksi <p>Baku Mutu INA : Baku mutu udara ambien yang berlaku di Indonesia berdasarkan PP 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan</p> <p>NO₂ = 50 µg/m³ SO₂ = 45 µg/m³ PM_{2,5} = 15 µg/m³</p>	Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan pengendalian Lingkungan Hidup	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan																														



NO.	INDIKATOR	FORMULASI PENGHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB																																																																								
	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	<p>Sumber : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Status Dan Kondisi Lingkungan Hidup Serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup</p> $IKL = IKTL + \text{Faktor Koreksi Gambut}$ $IKTL = 100 - [84,3 - (TL \times 100)] \times \frac{50}{54,3}$ $TL = \frac{\sum_{i=1}^{23} (\text{Luas Kelas Tutupan } i \times C_i)}{\sum_{i=1}^{23} (\text{Luas Kelas Tutupan } i)}$ <p>Keterangan: Perhitungan IKL dilakukan dengan menghitung kualitas tutupan lahan (yang masuk ke dalam kelas tutupan lahan) dan memasukkan faktor koreksi gambut. IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan Faktor Koreksi Gambut Kab. Magetan = 0 (karena tidak memiliki lahan gambut) TL = Tutupan Lahan C = Koefisien Kelas Tutupan Lahan</p> <table border="1" data-bbox="520 949 1059 1615"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Kelas Tutupan</th> <th>Koefisien (C)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Hutan Lahan Kering Primer</td><td rowspan="3">1</td></tr> <tr><td>2</td><td>Hutan Rawa Primer</td></tr> <tr><td>3</td><td>Hutan Mangrove Primer</td></tr> <tr><td>4</td><td>Hutan Lahan Kering Sekunder</td><td rowspan="2">0.9</td></tr> <tr><td>5</td><td>Hutan Rawa Sekunder</td></tr> <tr><td>6</td><td>Hutan Mangrove Sekunder</td><td>0.8</td></tr> <tr><td>7</td><td>Hutan Tanaman</td><td>0.6</td></tr> <tr><td>8</td><td>Belukar Rawa</td><td>0.4</td></tr> <tr><td>9</td><td>Belukar</td><td>0.45</td></tr> <tr><td>10</td><td>Perkebunan</td><td>0.4</td></tr> <tr><td>11</td><td>Pertanian Lahan Kering Campur</td><td>0.35</td></tr> <tr><td>12</td><td>Pertanian Lahan Kering</td><td>0.35</td></tr> <tr><td>13</td><td>Rawa</td><td>0.35</td></tr> <tr><td>14</td><td>Sawah</td><td>0.2</td></tr> <tr><td>15</td><td>Savanna</td><td>0.2</td></tr> <tr><td>16</td><td>Transmigrasi</td><td>0.15</td></tr> <tr><td>17</td><td>Bandara/Pelabuhan</td><td>0.1</td></tr> <tr><td>18</td><td>Tambak</td><td>0.1</td></tr> <tr><td>19</td><td>Tubuh Air</td><td>0.1</td></tr> <tr><td>20</td><td>Tanah Terbuka</td><td>0.1</td></tr> <tr><td>21</td><td>Permukiman/Lahan Terbangun</td><td>0.05</td></tr> <tr><td>22</td><td>Pertambangan</td><td>0.6</td></tr> <tr><td>23</td><td>RTH</td><td>0.6</td></tr> <tr><td>24</td><td>RHL</td><td>0.6</td></tr> </tbody> </table> <p>Sumber : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Status Dan Kondisi Lingkungan Hidup Serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup</p>	No.	Kelas Tutupan	Koefisien (C)	1	Hutan Lahan Kering Primer	1	2	Hutan Rawa Primer	3	Hutan Mangrove Primer	4	Hutan Lahan Kering Sekunder	0.9	5	Hutan Rawa Sekunder	6	Hutan Mangrove Sekunder	0.8	7	Hutan Tanaman	0.6	8	Belukar Rawa	0.4	9	Belukar	0.45	10	Perkebunan	0.4	11	Pertanian Lahan Kering Campur	0.35	12	Pertanian Lahan Kering	0.35	13	Rawa	0.35	14	Sawah	0.2	15	Savanna	0.2	16	Transmigrasi	0.15	17	Bandara/Pelabuhan	0.1	18	Tambak	0.1	19	Tubuh Air	0.1	20	Tanah Terbuka	0.1	21	Permukiman/Lahan Terbangun	0.05	22	Pertambangan	0.6	23	RTH	0.6	24	RHL	0.6	Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan pengendalian Lingkungan Hidup	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan
No.	Kelas Tutupan	Koefisien (C)																																																																										
1	Hutan Lahan Kering Primer	1																																																																										
2	Hutan Rawa Primer																																																																											
3	Hutan Mangrove Primer																																																																											
4	Hutan Lahan Kering Sekunder	0.9																																																																										
5	Hutan Rawa Sekunder																																																																											
6	Hutan Mangrove Sekunder	0.8																																																																										
7	Hutan Tanaman	0.6																																																																										
8	Belukar Rawa	0.4																																																																										
9	Belukar	0.45																																																																										
10	Perkebunan	0.4																																																																										
11	Pertanian Lahan Kering Campur	0.35																																																																										
12	Pertanian Lahan Kering	0.35																																																																										
13	Rawa	0.35																																																																										
14	Sawah	0.2																																																																										
15	Savanna	0.2																																																																										
16	Transmigrasi	0.15																																																																										
17	Bandara/Pelabuhan	0.1																																																																										
18	Tambak	0.1																																																																										
19	Tubuh Air	0.1																																																																										
20	Tanah Terbuka	0.1																																																																										
21	Permukiman/Lahan Terbangun	0.05																																																																										
22	Pertambangan	0.6																																																																										
23	RTH	0.6																																																																										
24	RHL	0.6																																																																										
	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah [IKPS]	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) dihitung berdasarkan aspek: 1. Kebijakan Pengelolaan Sampah 2. SDM Pengelola Sampah 3. Sarana Dan Prasarana (Pengangkutan Dan Pengolahan Sampah) 4. Anggaran Pengelolaan Sampah 5. Sosialisasi Dan Pemahaman Pengelolaan Sampah 6. Acceptability & Implementasi 7. Capaian Terhadap Target Dan Kapasitas	Laporan Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan pengendalian Lingkungan Hidup	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan																																																																								



NO.	INDIKATOR	FORMULASI PENGHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		8. Efisiensi Anggaran (Rasio Incremental Capaian Dan Target Per Kelas Anggaran) 9. Kota Bersih (Penilaian Adipura) 10. Nilai IKA (Indeks Kualitas Air), Komponen Dari IKLH. <i>Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</i>		
2	Rasio Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan	$\frac{\text{Ketersediaan Pangan per tahun}}{\text{Kebutuhan Pangan per tahun}} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <p>Ketersediaan pangan (TS) adalah jumlah pangan yang tersedia di suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk dalam jangka waktu tertentu</p> $TS = O - \Delta St + M - X$ <p>dimana,</p> <p>TS = total penyediaan dalam Negeri (<i>total supply</i>) O = produksi ΔSt = stok akhir – stok awal M = impor X = ekspor</p> <p>Kebutuhan pangan (TU) dalah jumlah pangan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat agar tercapai pola konsumsi pangan yang cukup, bergizi, dan seimbang sesuai standar gizi</p> $TU = F + S + I + W + Fd + Rou$ <p>dimana,</p> <p>TU = Total penggunaan (<i>total utilization</i>) F = Pakan S = Bibit I = Industry W = Tercecer Fd = Ketersediaan bahan makanan Rou = Penggunaan lain</p> <p>- Rasio ≥ 100% = ketersediaan pangan mencukupi kebutuhan penduduk. - Rasio < 100% = menunjukkan potensi kekurangan pangan.</p>	Laporan Neraca Bahan Makanan Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan
	Pravelensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Pravelence of Undernourishment)	<p>Pravelensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Pravelence of Undernourishment) adalah Proporsi penduduk yang tidak mendapatkan asupan energi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan minimal agar dapat hidup sehat dan aktif</p> $PoU = \int_{x < MDER}^s f(x) d(x)$ $CV(x) = \sqrt{CV^2(x/v) + CV^2(x/r)}$ <p>Keterangan:</p> <p>$f(x)$ = fungsi densitas $CV(x)$ = total simpangan baku $CV(x/v)$ = simpangan baku konsumsi kalori per kapita $CV(x/r)$ = komponen tetap, bernilai 0,179</p> <p><i>Sumber : Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat (2018)</i></p>	Laporan Analisis Konsumsi Pangan Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan



NO.	INDIKATOR	FORMULASI PENGHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	Skor PPH Konsumsi	Langkah dan Formulasi Perhitungan PPH Konsumsi : 1. Pengelompokan pangan 2. Konversi bentuk, jenis dan satuan 3. Menghitung sub total kandungan energi menurut kelompok pangan 4. Menghitung total energi aktual seluruh kelompok pangan 5. Menghitung kontribusi energi dari setiap kelompok pangan terhadap total energi aktual (dalam bentuk persen) 6. Menghitung kontribusi energi setiap kelompok pangan terhadap Angka Kecukupan Energi (% AKE) 7. Menghitung skor aktual berdasarkan kontribusi aktual dikalikan bobot masing-masing kelompok pangan. 8. Menghitung skor AKE 9. Menghitung Skor PPH 10. Menghitung Total Skor Pola Pangan Harapan <i>Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</i>	Laporan Analisis Konsumsi Pangan Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan
3	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP - Bobot 30 komponen perencanaan - Bobot 30 komponen pengukuran kinerja - Bobot 15 komponen pelaporan kinerja - Bobot 25 komponen evaluasi Komponen Perencanaan yang dinilai : 1. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah 2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>) 3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Komponen Pengukuran yang dinilai: 1. Pengukuran kinerja telah dilakukan 2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan 3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien Komponen Pelaporan, yang dinilai : 1. Pelaporan Kinerja sesuai dengan sistematika 2. Menyampaikan capaian IKU dengan analisa yang lengkap 3. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan 4. Memuat Rencana aksi tahun berikutnya Komponen Evaluasi, yang dinilai : 1. Kelengkapan dokumen SAKIP 2. Keselarasan dokumen perencanaan 3. Ketercapaian Kinerja 4. LHE ditindaklanjuti 5. Menyusun rencana aksi atas tindakan LHE LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya	Inspektorat Daerah	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM = $\frac{\text{Jumlah indeks per parameter}}{\text{Jumlah parameter}} \times 25$	Laporan SKM Dinas Lingkungan	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan



NO.	INDIKATOR	FORMULASI PENGHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		9 parameter IKM : 1. Persyaratan 2. Sistem mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan Prasarana	Hidup dan Pangan	Pangan

4.5. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah ditentukan melalui IKK (Indikator Kinerja Kunci). IKK Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kab. Magetan berlaku dari tahun 2025 sampai dengan Tahun 2030 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4. 6
Indikator Kinerja Kunci Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Urusan Lingkungan Hidup										
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	67,29	70,71	70,79	70,87	70,94	71,02	71,10	
2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Indeks	72,60	72,420	72,430	72,440	72,445	72,450	72,460	
Urusan Pangan										
1	% jumlah cadangan pangan pemerintah kab	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Skor PPH	Nilai 0-100	93,6	93,9	94,3	94,6	94,9	95,4	95,8	
3	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	0	0	0	0	0	0	0	
4	Persentase Pangan Segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	98	100	100	100	100	100	100	

Berdasarkan tabel diatas, terdapat target Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan sebesar 0% artinya Kabupaten Magetan mempunyai target tidak ada lagi wilayah yang masuk kategori rawan pangan, sehingga seluruh masyarakat di setiap daerah telah memiliki akses yang memadai terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi, baik dari sisi ketersediaan, keterjangkauan, maupun pemanfaatannya, yang mencerminkan tercapainya kondisi ketahanan pangan secara merata dan berkelanjutan.

**BAB
5**

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan Tahun 2025–2029 berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan arah, sasaran, dan tujuan bagi seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, serta pelayanan kepada para pemangku kepentingan (stakeholders).

Renstra ini merupakan penjabaran program dan kegiatan yang disusun untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2025–2029. Dengan ditetapkannya Renstra ini, seluruh pihak dan pemangku kepentingan yang terkait dengan pembangunan bidang lingkungan hidup dan pangan berkewajiban menjadikannya sebagai acuan serta arahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahunan sesuai peran masing-masing.

Lebih lanjut, Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan Tahun 2025–2029 juga menjadi dasar bagi pengukuran dan evaluasi kinerja secara akumulatif mulai tahun 2025 hingga 2029, sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh partisipasi, semangat, dan komitmen seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan, karena hanya dengan itu program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat diwujudkan secara optimal.

Dengan demikian, Renstra ini bukan sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan wujud nyata dari tuntutan pembangunan yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan, sekaligus sebagai instrumen untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Akhirnya, besar harapan kami agar Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan Tahun 2025–2029 dapat diimplementasikan secara konsisten sesuai tahapan yang telah direncanakan, sehingga mampu mendukung terwujudnya good governance serta tercapainya pembangunan Kabupaten Magetan yang berkelanjutan.

Magetan, 19 - 12 - 2025

KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
KABUPATEN MAGETAN



SAIF MUHLISSUN, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19721222 199303 1 005